



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

LKjIP 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kinerja pencapaian Tujuan dan Sasaran yang diemban Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun berikutnya.

Samarinda, Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH,



SRI WAHYUNI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (*continues improvement*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKjIP Tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja tahun kelima (terakhir) atas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang kemudian di reviu dalam Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Data dalam dokumen LKjIP ini merupakan kompilasi laporan kinerja Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa informasi kinerja yang sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yang kemudian diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan.

Pada Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 8 (delapan) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 98 (sembilan puluh delapan) sub kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 491.682.056.335,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 438.110.880.371,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 53.571.175.964,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 451.788.786.306,- (91,89%) dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp. 402.496.116.095,- (91,87%) dan Belanja Modal Rp. 49.292.670.211,- (92,01%).

Hasil capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada rangkuman pencapaian sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)*	3,15	3,51*	111,43
		Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	95,00	95,00	100,00
		Persentase Kebijakan Bidang Kesra yang ditindaklanjuti	90,00	100,00	111,11
		Persentase Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi	100,00	101,59	101,59

2.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00
		Persentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan yang tepat waktu Lingkup Pekerjaan Utama	80,00	96,63	120,78
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	80,00	70,55	88,19
3.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)	81,00	97,30	120,12
		Indeks Kelembagaan	69,00	88,48	128,23
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	71,00	87,06	122,62
		Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	77,80	84,26	108,30
		Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan	77,50	86,29	111,34

Sumber: P-RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dan data Biro diolah
*) Skor EKPPD Tahun 2022

Hasil capaian kinerja pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menjalankan tugas dengan baik dan dapat melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Namun demikian, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang masih memerlukan perbaikan dalam pencapaian kinerjanya guna penguatan peran Sekretariat Daerah dalam pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah. Indikator Kinerja yang perlu dilakukan upaya perbaikan adalah dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu; Indeks Tata Kelola Pengadaan yang memiliki realisasi kinerja sebesar 70,55 dari target 80,00 dan capaian sebesar 88,19%. Hal ini dikarenakan:

1. Seluruh nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Nasional menurun karena penambahan komponen pemanfaatan sistem pengadaan, yang awalnya hanya SIRUP dan e-Tendering menjadi SIRUP, e-Purchasing, Non e-Tendering/Non e-Purchasing, e-Tendering, Toko Daring, dan e-Kontrak.
2. Pemenuhan komponen yang diminta poin tersebut, termasuk bukti dukung, dan masih terus diupayakan pemenuhannya. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) yakni 64,30 maka, realisasi tahun ini (2023) yakni 70,55, Indeks Tata Kelola Pengadaan Kalimantan Timur justru meningkat.
3. Target yang tertera pada RENSTRA 2019-2023 masih berdasarkan perhitungan komponen yang belum ada perubahan, dan dipandang terlalu tinggi. Tahun 2023 memasuki tahun terakhir RENSTRA, sehingga target tidak dapat diubah lagi. Namun untuk RENSTRA 2024-2026 target Indeks Tata Kelola Pengadaan telah disesuaikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vii
BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	2
E. Sumber Daya Aparatur	4
F. Aspek Strategis Organisasi	6
G. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	7
H. Sarana dan Prasarana	8
BAB II Perencanaan Strategis	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Indikator Kinerja Utama	15
C. Perjanjian Kinerja	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akip Tahun Sebelumnya	19
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	24
C. Analisis Capaian Kinerja	27
1. Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	27
2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	39
3. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik	53
4. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah	59
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72
6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	72
7. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi Kalimantan Timur	73
D. Realisasi Anggaran	73
BAB IV Penutup	88
Lampiran	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2023	4
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur per Tahun 2023	9
Tabel 2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	11
Tabel 2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran	13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 2.5	Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	17
Tabel 2.6	Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023	18
Tabel 3.1	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017-2022	19
Tabel 3.2	Rekomendasi, Tindak Lanjut, dan Rencana Aksi	20
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Tahun 2023	25
Tabel 3.4	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	27
Tabel 3.5	Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023	27
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA	27
Tabel 3.7	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	39
Tabel 3.8	Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023	39
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA	39
Tabel 3.10	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	53
Tabel 3.11	Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023	53

Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA	53
Tabel 3.13	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	59
Tabel 3.14	Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023	59
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA	59
Tabel 3.16	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	72
Tabel 3.17	Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2023	72
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	74
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100/K.122/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 000.9.6.3/1162/B.Adpim-I tentang Tim Asistensi/*Coaching Clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
- Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 000.9.6.3/1434/B.Adpim-I tentang Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
- Nota Dinas Asisten Administrasi Umum Nomor: 000.1.5/0153/B.Adpim-I tanggal 05 Februari 2024, Hal: Undangan;
- Notulen Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- Daftar Hadir Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- Dokumentasi Kegiatan Perencanaan Tahun 2023;
- Piagam penghargaan Biro-biro Setda Prov. Kaltim Tahun 2023;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Administrasi Umum;
- Penghargaan Biro Terbaik Tahun 2023;
- Penghargaan Terhadap *Best Employee Individual* Tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan arah gerak operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Biro-biro yang diimplementasikan dalam mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Dasar pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah memiliki fungsi:

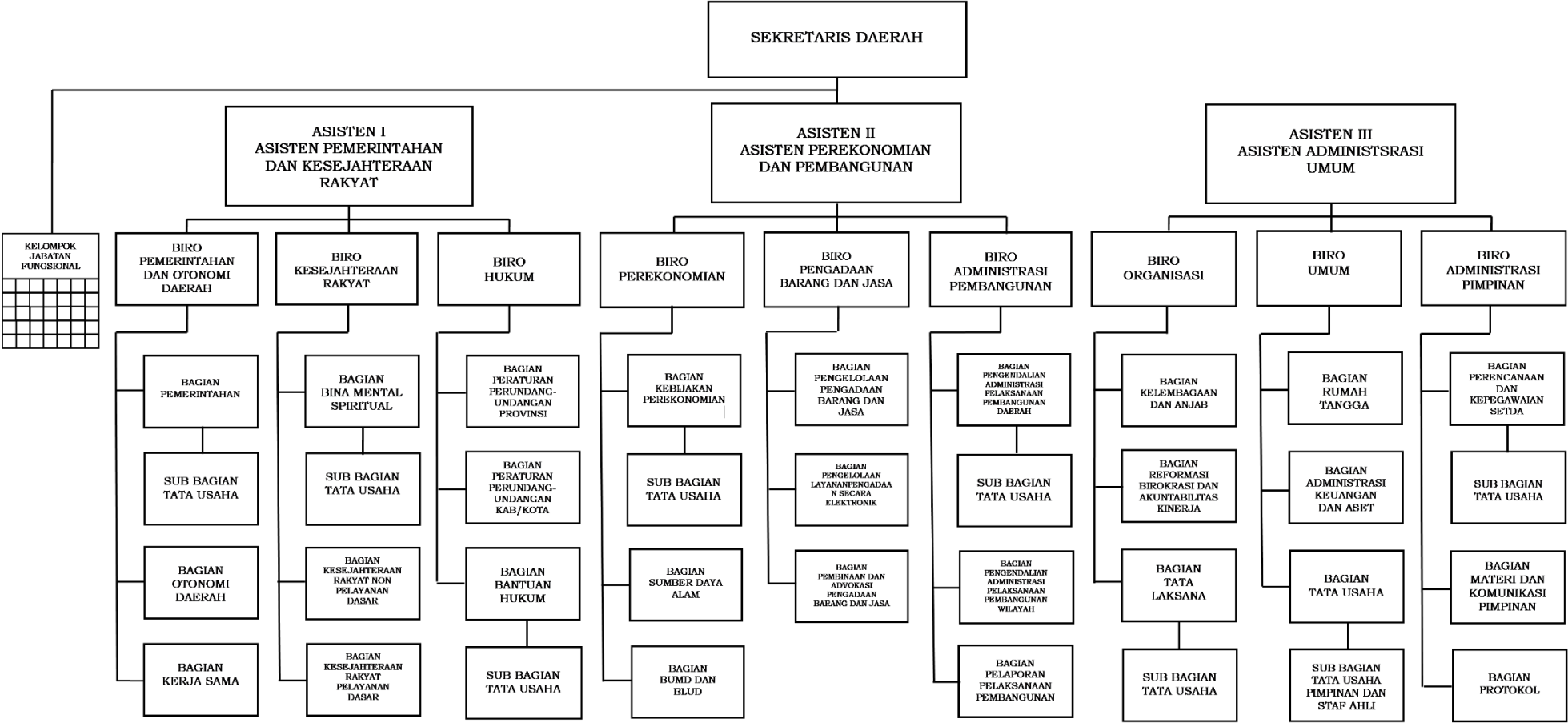
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyesuaikan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

ISRAN NOOR

E. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan profesional, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi.

Guna menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memadai, berkualitas dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini data mengenai PNS dan Non PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2023 pada Tabel 1.1:

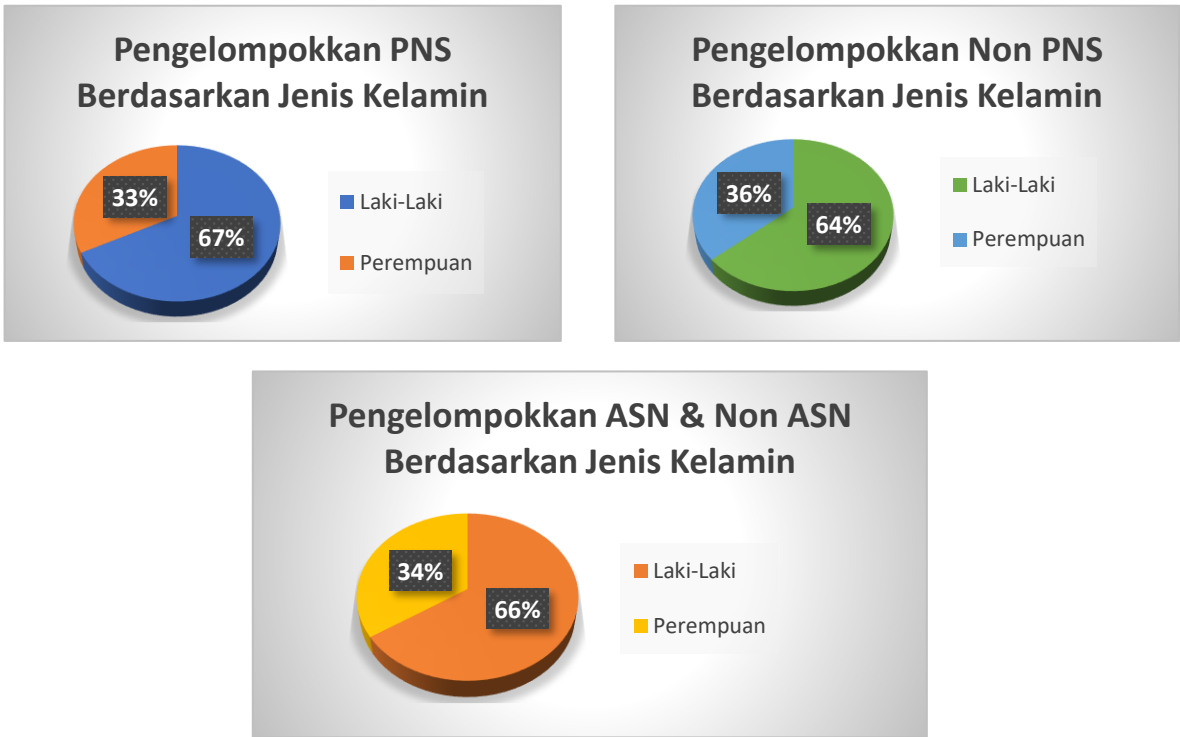
Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Per 31 Desember 2023

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana/ D4	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Sekretaris Daerah	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Asisten	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Staf Ahli	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Tenaga Fungsional Utama	1	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Kepala Biro	5	4	9	-	-	-	8	1	-	-	-	-
Kepala Bagian	15	12	23	4	-	-	22	5	-	-	-	-
Kepala Sub Bagian	44	37	22	57	-	-	27	54	-	-	-	-
Fungsional Umum (Pelaksana)	139	49	1	99	81	9	8	56	12	98	8	7
Fungsional Tertentu	17	5	-	21	1	-	1	15	5	-	-	-
Jumlah PNS	226	109	63	181	82	9	74	131	17	98	8	7
Jumlah Non PNS	194	110	-	-	-	-	7	133	20	135	6	3
Jumlah PNS + Non PNS	420	219	63	181	82	9	81	264	37	233	14	10
Jumlah	639		335				639					

Sumber: Data Biro Adpim Setda Prov. Kaltim

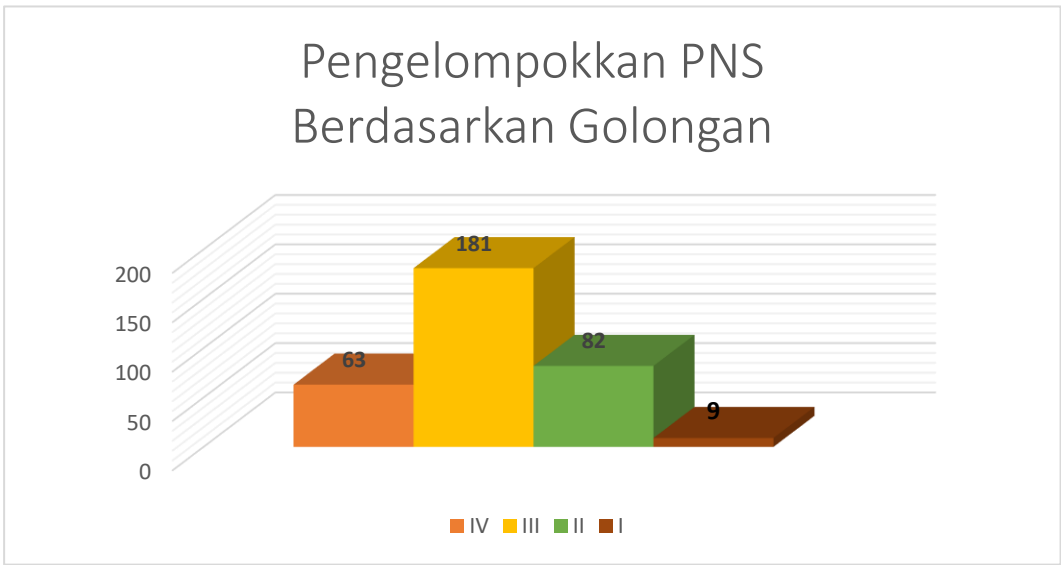
Berdasarkan data di atas, Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) orang. 420 (empat ratus dua puluh) orang mayoritas pegawai adalah laki-laki dan pegawai Perempuan sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) orang. Persentase pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1.1
Pengelompokan PNS dan Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



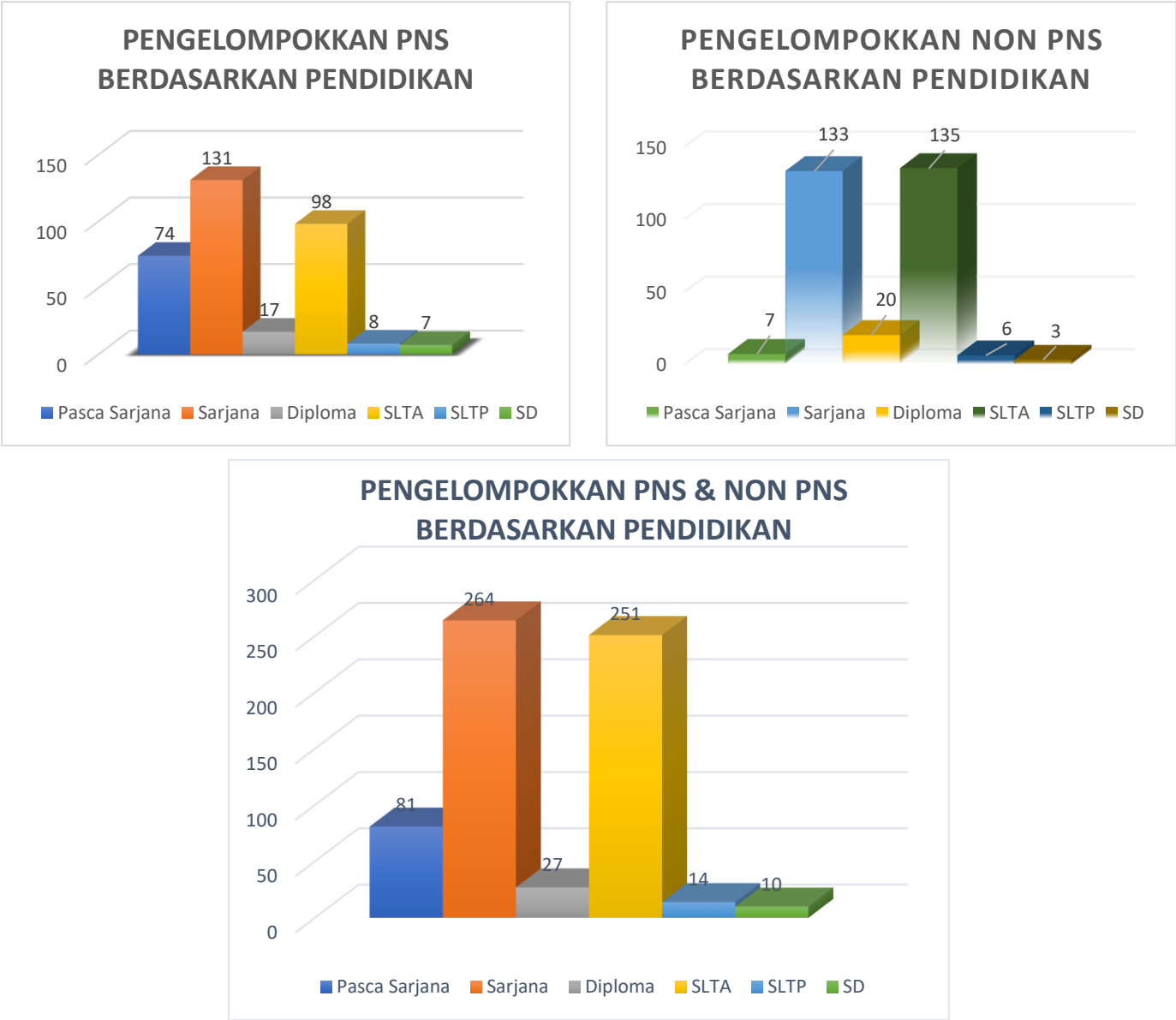
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya, baik dari pendidikan maupun kepangkatan. Berikut grafik pengelompokan pegawai berdasarkan golongan:

Grafik 1.2
Pengelompokan PNS Berdasarkan Golongan



Per 31 Desember 2023, Sumber Daya Aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Pasca Sarjana (S2/S3). Pengelompokan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.3 di bawah ini:

Grafik 1.3
Pengelompokan PNS dan Non PNS Berdasarkan Pendidikan



F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan adminisitratif.

Selain fungsi tersebut, Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang menangani urusan di bidang kerjasama

dan penetapan lokasi (penlok) penegasan batasan wilayah dan pertanahan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang menangani urusan pemilihan pengadaan barang dan jasa, pembinaan pelaku barang dan jasa serta LPSE, Biro Kesejahteraan Rakyat yang menangani pengelolaan pemberian dana hibah terkait sarana prasarana keagamaan dan hibah pendidikan khusus berbasis keagamaan.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Daerah dan Sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada Kelapa Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut adalah berperan dalam pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mendukung pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” dengan mengampu misi ke-5, yakni “Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik”. Misi ini diuraikan lagi menjadi tujuan dan sasaran, sebagaimana yang tertuang dalam P-Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yakni (1) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien, serta (2) Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. Sasaran dari kedua tujuan tersebut dapat diuraikan seperti di bawah ini:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas layanan pemerintah.

G. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Beberapa permasalahan utama di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Skor EKKPD tahun 2019-2020 belum ditetapkan dan diumumkan oleh Kemendagri berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, sehingga masih dalam tahap transisi/perubahan.
2. Beberapa usulan kerjasama tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya objek kerjasama.
3. Belum optimalnya penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat serta terdapat kegiatan yang memiliki *output* belum optimal dalam membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah.
4. Belum optimalnya koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Ham/Perangkat Daerah terkait penyelesaian bantuan hukum yang memerlukan waktu dan proses sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja.

5. Belum optimalnya upaya pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan di bidang Perekonomian serta belum tersusunnya data yang terintegrasi terkait dengan sektor-sektor di bidang perekonomian.
6. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelaporan.
7. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi pengadaan yang sesuai dengan standar keamanan dan kurangnya kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja yang telah disusun.
8. Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup.
9. Akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah masih belum optimal untuk dijadikan budaya/dasar budaya kinerja.
10. Belum optimalnya perencanaan terhadap kebutuhan pimpinan dan kebutuhan pelayanan Biro Umum.
11. Belum optimalnya peran dan fungsi pada Bagian Protokol dan Materi Komunikasi Pimpinan (MKP) sebagai pelayanan terhadap pimpinan.
12. Belum terpenuhinya dokumen perencanaan, pelaporan dan kepegawaian yang berkualitas.

H. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana kerja yang terdapat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	3.370	m2	
2	Gedung	2	Unit (2 lantai)	
		2.048	m2	
3	Listrik	3	Jaringan	
4	Air	3	Jaringan	
5	Telepon	118	Line	1 internet, telepon dan fax
6	Area Parkir	3	Area	
7	Ruang Rapat	16	Ruang	
8	Ruang Arsip	1	Ruang	
9	Koperasi	1	Unit	
10	Taman Dalam	2	Area	
11	Komputer	515	Unit	
12	Printer	489	Unit	
13	Meja	958	Unit	

Sumber: data Biro Umum Setda Prov. Kaltim

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Landasan dalam perumusan Tujuan dan Sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun **Visi** RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Sesuai dengan visi tersebut maka, ditetapkan **Misi** Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan Misi, sebagaimana berikut:

- Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
- Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
- Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.
- Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Adapun Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien		Nilai Akuntabilitas Kinerja		76.55	76.60	76.65	77.00	78.00	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3.07	3.08	3.095	3.10	3.15	Biro POD
			Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	85.00	90.00	90.00	92.50	95.00	Biro POD
			Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	80.00	85.00	85.00	87.00	90.00	Biro Kesra
			Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase			100.00	100.00	100.00	Biro Hukum
		Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase			90	95	100	Biro Perekonomian
			Indeks tata kelola pengadaan	Indeks			70 (cukup)	75 (baik)	80 (baik)	Biro PBJ
			Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	0	0	70	75	80	Biro Adbang
		Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	70	75	77	79	81	Biro Organisasi
			Indeks Kelembagaan	Indeks		65.64 (peringkat 4)	66 (peringkat 4)	67 (peringkat 4)	69 (peringkat 4)	

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat		81.50	82.00	82.30	82.50	83.00	
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	67	68	69	70	71	Biro Organisasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	76.61 (B/Baik)	77.00 (B/Baik)	77.10 (B/Baik)	77.50 (B/Baik)	77.80 (B/Baik)	Biro Umum
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	76.90	77.05	77.20	77.35	77.50	Biro Adpim

Sumber: P-RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

Tabel 2.2
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase		Fasilitasi Kerjasama Daerah	
		Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Biro Hukum
					Fasilitasi Bantuan Hukum	
		Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat
					Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
					Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non-Pelayanan Dasar	
	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Biro Perekonomian
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
		Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Administrasi Pembangunan
					Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
		Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Presentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi
		Indeks Kelembagaan	Indeks		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Umum
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Administrasi Pimpinan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Fasilitasi Keprotokolan	
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Biro Organisasi

Sumber: data Biro-biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah, tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran.

Secara sederhana, untuk mengukur Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat diidentifikasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dilihat penjelasannya pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD)	Peringkat	Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	Laporan Hasil Evaluasi Dari Kementerian Dalam Negeri	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	2. Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah Rancangan Produk Hukum diharmonisasi}}{\text{Total Produk Hukum Yang Akan Dibuat}} \times 100\%$	Produk Hukum	Biro Hukum
	3. Indeks Kelembagaan	Indeks (rumus)	Perhitungan sesuai dengan Permen PANRB No.20 Tahun 2018	Data Kelembagaan	Biro Organisasi
	4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	$= \frac{\text{Nilai Total Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\text{Jumlah Unit Pelayanan Yang Melaksanakan IKM}} \times 100\%$	IKM	Biro Umum/ Biro Administrasi Pimpinan
	5. Persentase Kebijakan Bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang disiapkan}}{\text{Total kebijakan Kesra yang menjadi isu strategis dalam satu tahun}} \times 100\%$	Dokumen Hasil Koordinasi dan Monev	Biro Kesejahteraan Rakyat
	6. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang disiapkan}}{\text{Total kebijakan Perekonomian}} \times 100\%$	Dokumen	Biro Perekonomian
	7. Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	$= \frac{\text{jumlah kegiatan pembangunan strategis selesai tepat waktu}}{\text{seluruh kegiatan pembangunan strategis}} \times 100\%$	Dokumen RPJMD	Biro Administrasi Pembangunan
	8. Maturitas UKPBJ	Level	Hasil Evaluasi LKPP	Sesuai Penilaian LKPP	Biro PBJ
	9. Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah kerjasama yang tindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kerjasama yang diinisiasi}} \times 100\%$		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Sumber: IKU Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Setda Prov. Kaltim dan dalam pelaporan kinerja. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja harus memperhatikan RPJMD, RENSTRA, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2023 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3.15
	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	95
	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	90
	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	100
	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	80
	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	80
Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	81
	Indeks Kelembagaan	Indeks	69
Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	77.80
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77.50
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	71

Sumber: Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2023

1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 491.682.056.335,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 438.110.880.371,- dan Belanja Modal Rp. 53.571.175.964,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 451.788.786.306,- (91,89%) dengan rincian Belanja Operasi Rp. 402.496.116.095,- (91,87%) dan Belanja Modal Rp. 49.292.670.211,- (92,01%).

2. Target Belanja Setda Prov. Kaltim Tahun 2023

Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%	Sisa Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi	Rp. 438.110.880.371	Rp. 402.496.116.095	91,87	Rp. 35.614.764.276
2	Belanja Modal	Rp. 53.571.175.964	Rp. 49.292.670.211	92,01	Rp. 4.278.505.753

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		117.305.756.182	95.749.901.607	81,62
1.1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	17.500.311.482	17.217.086.792	98,38
1.2	Program Kesejahteraan Rakyat	95.184.734.700	74.136.024.338	77,89
1.3	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.620.710.000	4.396.790.477	95,15
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan		33.310.538.950	27.360.136.262	82,14
2.1	Program Program Perekonomian dan Pembangunan	16.626.589.900	11.692.484.168	70,32
2.2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	7.445.751.900	6.739.102.938	90,51
2.3	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	9.238.197.150	8.928.549.156	96,65
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik		5.420.217.500	4.613.658.334	85,12
3.1	Program Penataan Organisasi	5.420.217.500	4.613.658.334	85,12
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan pemerintah		312.666.661.316	289.080.855.310	92,46
4.1	Program Penataan Organisasi	1.109.696.500	1.009.283.747	90,95
4.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	277.205.774.903	254.154.761.302	91,68
4.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	34.351.189.913	33.916.810.261	98,74

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKIP TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

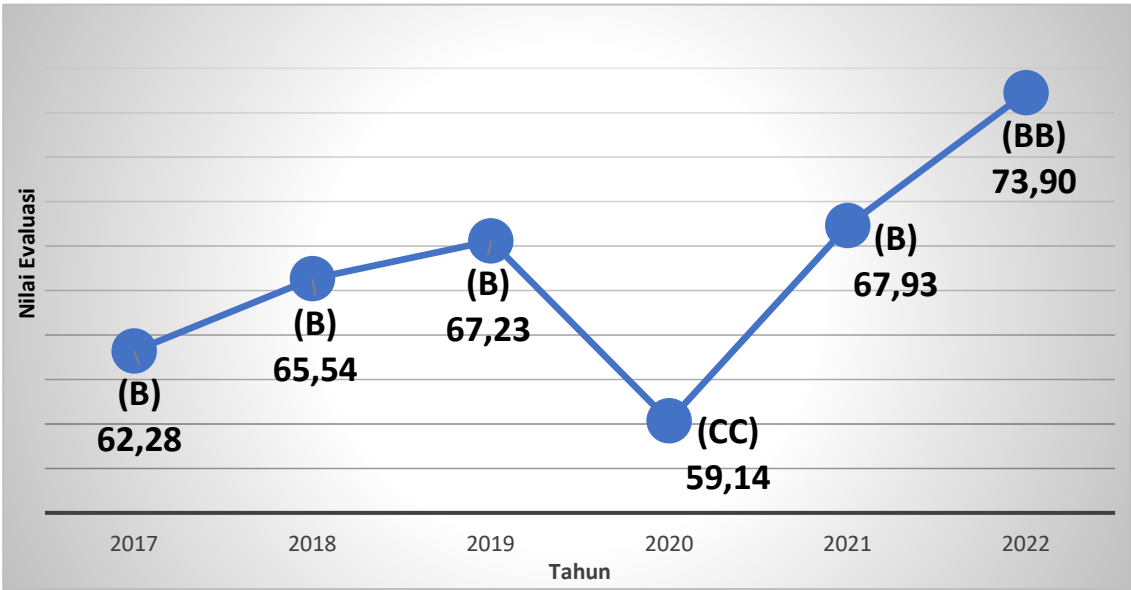
Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017-2022

No	Komponen yang dinilai	Nilai Tahun						Peningkatan/ Penurunan Capaian 2021-2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Perencanaan Kinerja	22,07	22,82	22,40	20,39	23,75	22,20	-1,55
2	Pengukuran Kinerja	17,19	17,19	15,94	13,75	15,00	14,80	-0,20
3	Pelaporan Kinerja	9,67	7,87	10,07	9,88	11,22	7,70	-3,52
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,99	6,27	6,27	3,84	6,85	14,00	7,15
5	Capaian Kinerja	7,36	11,39	12,55	11,28	11,12	15,20	4,08
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		62,28	65,54	67,23	59,14	67,93	73,90	5,97
Kategori Penilaian		B	B	B	CC	B	BB	

Sumber: Data Inspektorat Daerah Prov. Kaltim

Predikat Akuntabilitas Setda Prov. Kaltim Tahun 2017 s/d 2022



2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP

Tindak lanjut terhadap rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat penjelasannya pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
1.	Perencanaan Kinerja Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja supaya didukung dengan analisa/dasar penetapan target sehingga target kinerja yang ditetapkan memadai dan memenuhi kriteria dapat dicapai (<i>achievable</i>), menantang, dan realistis.	a. Terhadap target kinerja yang tidak memenuhi kriteria <i>achievable</i>, menantang dan realistis misalnya saja EKPPD, pada RENSTRA 2024-2026 di <i>drop</i>, tidak lagi dipergunakan. Indikator kinerja yang dibuat termasuk formulanya mengacu pada SMART-C; b. Disarankan kepada Biro-biro untuk membuat analisa dasar atau dalam pembuatan target, serta dalam RENSTRA dan RENJA dimuat sebagai kondisi awal; c. Dalam Akuntabilitas Kinerja atau LKjIP Tahun 2023 ini, analisis terhadap pencapaian dan kegagalan target dianalisa dengan lebih tajam dan komprehensif.	a. Sudah b. Sudah c. Sudah
2.	Pengukuran Kinerja Memanfaatkan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam: a. Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada bagian ataupun setiap individu pegawai; b. Penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional; c. Pengusulan penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi.	Pengukuran Kinerja Setda Prov. Kaltim sebagai dasar pada: a. (1) Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada bagian maupun individu pegawai. Setda Prov. Kaltim telah memiliki penghargaan "<i>Employee of the month</i>". Penghargaan tersebut disempurnakan dengan menambahkan unsur kinerja pegawai sebagai salah satu komponen penilaian. Kemudian, setiap Biro mengajukan usulan; (2) Selain itu juga diberikan penghargaan lingkup Biro, dengan komponen kinerja sebagai salah satu unsur penilaian; b. Dibuatkan TS kepada pimpinan (Sekda) bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan sebagai penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional; c. Pengusulan penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi.	a. Sudah b. Sudah c. Sudah
3.	Laporan Kinerja Dalam penyusunan Dokumen Laporan Kinerja supaya: a. Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun; b. Informasi dalam laporan kinerja berkala supaya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023: a. Sudah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun; b. Informasi laporan kinerja berkala dalam hal ini setiap triwulan melalui monitoring dan evaluasi (monev) disertai penguatan analisis pada faktor pendukung, faktor penghambat, permasalahan, solusi dan upaya, diusulkan sebagai dasar penyesuaian anggaran yang tertuang pada APBD-P/P-RKPD.	a. Sudah b. Sudah

4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal supaya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal masing-masing Biro digunakan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, sehingga anggaran berbasis kinerja berjalan sebagaimana seharusnya.	Sudah
5.	Capaian Kinerja Capaian Kinerja supaya didukung dengan data yang memadai yakni didukung dengan sumber data.	Capaian Kinerja yang dituangkan pada Kertas Kerja maupun pada e-Kinerja dan e-SAKIP (SIAKIP), sudah didukung dengan eviden atau data dukung yang memadai. Bukan hanya pada level JPT Pratama saja, namun juga pada level Administrator, Eselon IV, hingga JF dan Pelaksana.	Sudah

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan hal-hal yang patut dijadikan pertimbangan dalam peningkatkan kinerjanya. Hal rutin dimaksud berkaitan dengan SAKIP yakni Monev Renaksi Triwulan I, Monev Renaksi Triwulan II, Monev Renaksi Triwulan III dan Monev Renaksi Triwulan IV.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara rutin juga melaksanakan Penyusunan RENJA dimulai dari Ranwal hingga Ranhir RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan tahapan dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023 ini, dilaksanakan penyusunan RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 sebagai turunan dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan RENSTRA ini dimulai dari FGD Percepatan Penyusunan RENSTRA guna menyerap aspirasi terhadap masalah pokok Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tujuan, Sasaran, IKK, IKU, Arah Kebijakan, hingga Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim. FGD ini dimaksudkan juga agar Biro-biro di lingkup Setda memiliki pandangan yang sama terhadap penyusunan RENSTRA, selain waktunya yang sangat singkat juga adanya penyesuaian terhadap tahapan-tahapan penyusunan RENSTRA.

Penyerapan aspirasi ini dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terhadap RENSTRA 2024-2026 yang juga dihadiri oleh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya dilaksanakan finalisasi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi evaluator secara nyata, misalnya saja, rekomendasi agar target yang

ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja supaya didukung dengan analisa/dasar penetapan target sehingga target kinerja yang ditetapkan memadai dan memenuhi kriteria dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis ini menjadi perhatian dalam penyusunan IKU Sekretariat Daerah yang kemudian menjadi pembenahan pada RENSTRA 2024-2026.

Rekomendasi agar menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun telah ditindaklanjuti pada penyajian Laporan Kinerja tahun 2023. Hal ini berbeda dengan laporan-laporan tahun sebelumnya yang hanya dilakukan perbandingan pada tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

Selain hal rutin di atas, dilakukan pula penguatan SAKIP sebagai inovasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah senantiasa menjadikan SAKIP sebagai budaya kerja dan hal ini dituangkan pada Laporan Budaya Kerja Tahun 2023 melalui masing-masing Biro.
- b. Penguatan kolaborasi pada 9 Biro lingkup Setda yang dilaksanakan sesuai dengan Pergub Sistem Kerja sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang telah diaplikasikan di lingkungan Setda Prov. Kaltim bahkan sebelum Pergub ini dikeluarkan. Dalam penyusunan RENSTRA, RENJA, dan Laporan Akuntabilitas dilaksanakan secara kolaborasi bersama-sama 9 Biro di lingkup Setda Prov. Kaltim.

Surat Tugas atau Surat Keputusan berkaitan dengan kolaborasi di atas sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.5/1163/B.Adpm-I tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi dan Evaluasi Capaian Kinerja serta Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
2. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.9.6.3/1162/B.Adpm-I tentang Tim Asistensi/*Coaching Clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/1161/B.Adpm-I tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
4. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/1979/B.Adpm-I tentang Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

5. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/7278/B.Adpim-I tentang Pembentukan Tim Pembahas dan Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
 6. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.8.3.1/2823/B.Adpim-I tentang Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023;
 7. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/12357/B.Adpim-I tentang Pembentukan Tim Pembahas dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023;
 8. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.7/15361/B.Adpim-I tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 9. Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/0444/B.Adpim-I tentang Panitia Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
 10. Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/1052/B.Adpim-I tentang Panitia Kegiatan Pembahas dan Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
 11. Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.5/1218/B.Adpim-I tentang Panitia Kegiatan Rencana Aksi dan Evaluasi Capaian Kinerja serta Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
 12. Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.9.6.3/1434/B.Adpim-I tentang Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
 13. Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.3/2324/B.Adpim-I tentang Panitia Kegiatan Penguatan Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2023.
- c. Masalah yang ditemukan dalam peningkatan kinerja dijadikan sebagai tantangan atau *challenge* sehingga inovasi terus-menerus dilakukan guna mengatasi masalah yang ada. Inovasi berkaitan dengan penguatan SAKIP antara lain sebagai berikut:

1. Rakor Perencanaan I (pertama) Lingkup Kabupaten/Kota se Kaltim, diharapkan akan membantu perencana Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kemampuan dan penguatan perencana Kabupaten/Kota sebagai *leading sector* perencanaan lingkup Setda.
2. Bimtek Perencanaan kerjasama dengan Universitas Brawijaya-Malang merupakan Bimtek penguatan perencanaan untuk merumuskan Pohon Kinerja, Cascading Setda Prov. Kaltim dan Indikator Kinerja yang SMART-C.
3. Sosialisasi dan *Workshop* Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk pertamakalinya diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pimpinan bekerjasama dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari sosialisasi dan *workshop* untuk mengetahui sistem pengendalian seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Dimana Biro Administrasi Pimpinan ditunjuk sebagai koordinator Biro-biro.
4. Pembuatan Buku RENSTRA 2024-2026 tampilan full warna dengan desain grafis yang menarik sebagai Upaya agar setiap individu pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memahami Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah dan lebih lanjut agar lebih mudah dalam memahami IKU, IKK, dan IKI masing-masing.
5. Rapat Pimpinan (Rapim) I Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, merupakan kegiatan yang baru pertama dilaksanakan Biro Administrasi Pimpinan atas arahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Rapat Pimpinan (Rapim I) Setda Prov. Kaltim berperan penting dalam mengkoordinasikan Program-program dan Kegiatan-kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro-biro lingkup Setda Prov. Kaltim. Selain mengevaluasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tahun 2023 yang telah dilaksanakan, dan menjadi persiapan pelaksanaan APBD dan Kinerja Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2024.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)*	Skor	3,15	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3,15	3,51*	111,43
		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	95,00	Triwulan I	30,00	17,00	56,67
					Triwulan II	30,00	30,00	100,00
					Triwulan III	30,00	38,00	126,67
					Triwulan IV	10,00	15,00	150,00
		Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	90,00	Triwulan I	20,00	15,00	75,00
					Triwulan II	25,00	20,00	80,00
					Triwulan III	25,00	30,00	120,00
					Triwulan IV	20,00	33,00	165,00
		Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100,00	Triwulan I	25,00	23,00	92,00
					Triwulan II	25,00	27,00	108,00
					Triwulan III	25,00	25,00	100,00
					Triwulan IV	25,00	25,00	100,00
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	100,00	100,00	100,00
		Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	80,00	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	80,00	96,63	120,78
		Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	80 (Baik)	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	80,00	70,55	88,19

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	81,00	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	81,00	97,30	120,12
					Triwulan IV	0	0	0
		Indeks Kelembagaan	Indeks	69 (peringkat 4)	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	69,00	88,48	128,23
4.	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	71,00	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	71,00	87,06	122,62
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	77,80 (B/Baik)	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	77,80	84,37	108,44
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	77,80	84,15	108,16
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77,50	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	77,50	86,80	112,00
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	77,50	86,30	111,36

Sumber: data Biro-biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim Tahun 2023 diolah

*) Skor EKPPD tahun 2022

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran 1: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.4
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3,15	3,51*	111,42
2.	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	95,00	95,00	100,00
3.	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	90,00	100,00	111,11
4.	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100,00	101,59	101,59

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah
*) Skor EKPPD tahun 2022

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.5
Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6-1)*100
1.	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	-	2,77	3,51	3,51*	0,00
2.	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	90,00	85,00	90,00	95,00	5,55
3.	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	85,00	85,00	100,00	100,00	0,00
4.	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100,00	99,86	102,00	101,59	-0,40

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah
*) Skor EKPPD tahun 2022

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.6
Perbandingan Realiasasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3,15	3,51*	111,42
2.	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	95,00	95,00	100,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3.	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	90,00	100,00	111,11
4.	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100,00	101,59	101,59

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah
 *) Skor EKPPD tahun 2022

d. Analisis penjabaran data capaian.

1) **Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):**

- Skor Evaluasi Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Daerah merupakan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Nasional Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga/Kementerian lainnya terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun N-1 yang disampaikan Pemerintah Provinsi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun berjalan dan disampaikan melalui Sistem Pelaporan SILPPD dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data capaian terdiri dari Indikator Kinerja Kunci baik Outcome sebanyak 115 IKK dan 498 Output yang meruapakan dari 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan penunjang. Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga merupakan salah satu gambaran nyata Kinerja Kepala Daerah yang dilakukan berdasarkan pemeringkatan Nasional. Hasil tersebut menjadi Pemeringkatan Nasional dengan Status Kinerja (Sangat Rendah/Rendah/Sedang/Tinggi dan Sangat Tinggi) dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Berikut adalah hasil evaluasi berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022:

**Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 34 (Tiga Puluh Empat) Provinsi**

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
1	Provinsi Jawa Timur	3,6970	Tinggi
2	Provinsi Jawa Tengah	3,6791	Tinggi

3	DKI Jakarta	3,6560	Tinggi
4	Provinsi Jawa Barat	3,6485	Tinggi
5	DI Yogyakarta	3,5353	Tinggi
6	Provinsi Kalimantan Timur	3,5178	Tinggi
7	Provinsi Bali	3,4813	Tinggi
8	Provinsi Sumatera Selatan	3,4811	Tinggi
9	Provinsi Riau	3,4778	Tinggi
10	Provinsi Kepulauan Riau	3,4730	Tinggi
11	Provinsi Kalimantan Selatan	3,4653	Tinggi
12	Provinsi Banten	3,4592	Tinggi
13	Provinsi Sulawesi Selatan	3,3531	Sedang
14	Provinsi Bengkulu	3,1670	Sedang
15	Provinsi Sulawesi Tengah	3,1145	Sedang
16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,0439	Sedang
17	Provinsi Jambi	3,0239	Sedang
18	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,9920	Sedang
19	Provinsi Sulawesi Utara	2,9723	Sedang
20	Provinsi Aceh	2,9618	Sedang
21	Provinsi Kalimantan Utara	2,9479	Sedang
22	Provinsi Sumatera Utara	2,9354	Sedang
23	Provinsi Gorontalo	2,8779	Sedang
24	Provinsi Kalimantan Barat	2,8559	Sedang
25	Provinsi Sumatera Barat	2,7333	Sedang
26	Provinsi Maluku	2,7298	Sedang
27	Provinsi Sulawesi Barat	2,6855	Sedang
28	Provinsi Lampung	2,6845	Sedang
29	Provinsi Maluku Utara	2,6819	Sedang
30	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,6140	Sedang
31	Provinsi Kalimantan Tengah	2,5979	Rendah
32	Provinsi Papua Barat	2,5929	Rendah
33	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,5793	Rendah
34	Provinsi Papua	2,2383	Rendah

Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Kabupaten/Kota	Skor	Status
64.01	Kabupaten Paser	2,7724	Sedang
64.02	Kabupaten Kutai Kartanegara	3,1135	Sedang
64.03	Kabupaten Berau	3,1964	Sedang
64.07	Kabupaten Kutai Barat	2,7564	Sedang
64.08	Kabupaten Kutai Timur	2,9131	Sedang
64.09	Kabupaten Penajam Paser Utara	2,8325	Sedang
64.11	Kabupaten Mahakam Ulu	2,1913	Rendah
64.71	Kota Balikpapan	3,1566	Sedang
64.72	Kota Samarinda	3,4529	Tinggi
64.74	Kota Bontang	3,3790	Sedang

2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:

Capaian sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator tujuan Persentase Kerja Sama yang ditindaklanjuti

didapatkan dari Jumlah Usulan kerja sama di bagi dengan jumlah kerja sama yang ditindak lanjuti. Namun ada beberapa usulan yang tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan beberapa sebab oleh karena itu realisasi tidak dapat 100 persen.

Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti

Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti

Jumlah kerjasama yang diinisiasi

$\times 100\%$

Jumlah Rekapitulasi Kerja Sama Tahun Anggaran 2023

Bentuk Dokumen Kerjasama	Kerjasama Pemerintah	Kerjasama antar Badan Usaha/Swasta	TOTAL
Kesepakatan Bersama	5	6	62
Perjanjian Kerja Sama	13	4	
Nota Kesepakatan	12	0	
Addendum	2	0	
Dalam Proses	12	8	
Jumlah	44	18	

3) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:

Sesuai definisi operasional penghitungan indikator ini adalah Kebijakan Bidang Kesra Yang ditindaklanjuti dibagi semua kebijakan bidang Kesra dari pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti, serta isu permasalahan daerah yang membutuhkan kebijakan daerah. Adapun penjelasan dari Kebijakan bidang Kesra dari pemerintah pusat adalah kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan daerah dan berdasarkan hasil analisis ataupun amanah dalam peraturan tersebut yang mengharuskan daerah membuat kebijakan turunan, misal nya Peraturan presiden tentang Stunting, yang diturunkan menjadi Peraturan gubernur dan lain sebagainya. Sedangkan Kebijakan daerah yang diangkat daerah karena menjadi permasalahan daerah atau merupakan kebijakan yang merupakan amanat kepala daerah. Untuk indikator ini capaian kinerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat cukup tinggi yaitu 111,11 %. Tingginya capaian ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Target dalam Renstra Tahun 2023 sebesar 90% dan tidak dapat dilakukan revisi target mengingat ini adalah tahun akhir Renstra Setda, sesuai dengan definisi dan tupoksi Biro Kesra seharusnya seluruh kebijakan bidang kesra ditindak lanjuti;

b) Seluruh kegiatan yang direncanakan atau disusun yang meliputi 12 sektor yang menjadi lingkup koordinasi Biro Kesra, semua kegiatan fasilitasi, koordinasi & monev terselenggara/terlaksanakan.

Adapaun 12 sektor dimaksud meliputi:

- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim;
- 2. Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim;
- 3. Dinas Sosial Provinsi Kaltim;
- 4. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim;
- 5. Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim;
- 6. Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim;
- 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim;
- 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim;
- 9. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim;
- 10. Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim;
- 11. Dinas Perpustakaan & Arsip;
- 12. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kaltim.

Data Dukung Analisis Penjabaran data Capaian Biro Kesra Tahun 2023

NO	BAGIAN	OUTPUT
1	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	 REKOMENDASI Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pergub Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Dana BOSDA pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah dan Monev Kebijakan Pelaksanaan di Provinsi Kalimantan Timur Dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pergub Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Dana BOSDA pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah dan Monev Kebijakan Pelaksanaan di Provinsi Kalimantan Timur di Provinsi Kalimantan Timur, maka pada hari ini... Hari, Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023 Jam : 08.00 s.d. selesai Tempat : Ruang Rapat Hotel Bluesky Balikpapan
2	Sektor Kesehatan	 REKOMENDASI KEBUTUHAN BIDANG KESEHATAN Dalam Rangka Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Menghadapi Bencana/Disaster/Krisis Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu... Isi : Kritis Tanggal : 02 November 2023 Tempat : Ruang Rapat Hotel Bluesky Balikpapan Telah dilaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion Kesehatan Daerah Dalam Menghadapi Bencana/Disaster/Krisis Kesehatan Di Kalimantan Timur, yang telah dihadiri oleh seluruh undangan sebagai berikut: Terdapat beberapa permasalahan dan diskusi terhadap materi, kemudian peserta FGD menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan akibat dari peristiwa FGD yaitu... 1. Biro Kesra/Struktur Rakor Sekda Prov. Kaltim Bersama Biro Penguatan dan Operasi Daerah Sekda Prov. Kaltim berkolaborasi dan mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan SP4 Provinsi Kalimantan Timur

8	Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim	 BERITA ACARA REKOMENDASI KESEPAKATAN Nama Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan tentang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hari, Tanggal : Kamis, 30 November 2023 Waktu : 08.00 s.d. 13.00. Wita Tempat : Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Jl. Soekarno Hatta No. 28 Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Pemimpin Rapat : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9	Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim	BERITA ACARA KESEPAKATAN Dalam Rangka Kegiatan Rapat Studi Tinu Pemanfaatan E-Government Dalam Penguatan Kemiskinan Peningkatan Daya Saing Ekonomi di Era Digital di Provinsi Bali, maka pada : Hari, Tanggal : Senin, 20 November 2023 Waktu : 14.00 s.d. 17.00. WITA Tempat : Fairfield by Marriot Hotel Bali Telah dilaksanakan yang telah dihadiri oleh seluruh undangan terlampir. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya peserta Rapat Studi Tinu Pemanfaatan E-Government Dalam Penguatan Kemiskinan Peningkatan Daya Saing Ekonomi di Era Digital menyepakati beberapa hal yang berkekelompokan menjadi kesepakatan akhir dari pertemuan Rapat Studi Tinu Pemanfaatan E-Government Dalam Penguatan Kemiskinan Peningkatan Daya Saing Ekonomi di Era Digital yaitu : KADINSOSP3A 1. Aplikasi Call center Sapa (Sahabat Perempuan dan Anak) 129 ini adalah aplikasi dari KEMENPPPA. Mekanisme nya panggilan pelapor akan diterima oleh Kementerian PPPA, kemudian permasalahan akan diklasifikasi terlemb dahulu sebelum diberlakukan tindak lanjutnya. 2. Provinsi Bali memiliki jumlah kemiskinan ekstrem terendah di Indonesia, namun begitu kami masih menerapkan upaya penurunan si miskin dengan memberikan sembako, modal usaha, peningkatan sarpas uk, meningkatkan kompetensi. 3. Kemudian trik berikutnya ialah bagaimana menaikan pendapatan, maka kami perlu melakukan assesmentnya, tidak serta merta kita berika "kui" tapi juga berikan "kalanya" 4. Pembekalan kompetensi ini juga perlu diperhatikan dan disesuaikan pemberiannya, jangan sampai pembekalan ini malah jadi tidak tepat sasaran. 5. UNBM menengah – kecil juga perlu menjadi perhatian untuk disosialisai. Kami sudah memiliki 14 kebijakan yang sudah menaungi permasalahan ini. Kemudian setelah program berkelanjutan ini diberikan, selanjutnya kami berika program pendampingan untuk memperluas wawasan UNBM lokal. 6. Jika mau meminta materi terkait kebijakan aplikasi yang berkaitan dengan peranan OPD dengan permasalahan yang ada.
10	Perhubungan Provinsi Kaltim	BERITA ACARA KESEPAKATAN Dalam Rangka Kegiatan Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran Provinsi Kalimantan Timur, maka pada : Hari, Tanggal : Selasa, 11 April 2023 Waktu : 09.00 s.d. Selasa Tempat : Ruang Rufus Rahayu Lt. I, Kantor Gubernur Kaltim Telah dilaksanakan yang telah dihadiri oleh seluruh undangan terlampir. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya peserta Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran menyepakati beberapa hal yang berkekelompokan menjadi kesepakatan akhir dari pertemuan Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran yaitu : 1. Sesuai dengan KIRKA Intelejen dimana adanya peningkatan dinamika kegiatan masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri tahun 2023 sehingga dirumuskan akan terjadinya peristiwa sebagai dampak adanya giat mudik/balik dan giat selama lebaran, seperti akan musunya tidak jidat, kemacetan, ger Lalin, Ketatapan Hubertahan, bersana akan maupun kejadian lain yang akan terjadi menjelang lebaran tahun 1444 H. 2. Agar masing-masing instansi mengedepankan unsur 3 K (KOORDINASI, KOMUNIKASI dan KOLABORASI) dalam membangun Kerjasama pada giat OPS Ketapal 2023 agar ljuan operasi tercapai dengan baik. 3. Agar seluruh pihak unsur pelayanan, pengamanan OPS Ketapal 2023 di masing-masing instansi terlibat secara aktif, sadar serta bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugasnya sehingga terjadi kolaborasi yang baik dalam pelayanan/pengamanan giat masyarakat guna mencegah dan mengurangi dampak yang terjadi akibat dari dinamika giat masyarakat di dalam perayaan Idul Fitri tahun 2023. 4. BMKG Kalimantan Timur siap dengan informasi MKG untuk mendukung giat penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2023/1444H. 5. KICOP Samarinda akan menyiapkan kapal dengan kapasitas 1600, untuk tanggal 19 dan 20 kami siapkan kapal untuk memsupport. Terepat juga 3 operator kapal yang mengawal arus mudik.
11	Kebudayaan	Policy Brief PERAN AKTIF DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UJUN ABSTRAK 16.03.2024 2.00.00 ABSTRAK Budaya atau Kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi. Melestarikan budaya daerah yang beraneka ragam merupakan kewajiban sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup berbudaya, dengan harapan anak cucu kita tetap mengetahui apa yang menjadi ciri khas budaya kita. Modernitas dan kemajuan perkembangan teknologi saat ini semakin mereduksi tradisi budaya, sehingga sangat diharapkan leordasdi kita dalam memanfaatkan teknologi ini dengan bijak. Dalam mempertahankan dan mewariskan kebudayaan tentu kita masih dihadapi dengan permasalahan secara nasional maupun lcederahan. Untuk itu asen pemerintah pusat dan daerah sangat penting melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, sebagai langkah meminimalisir permasalahan yang kita hadapi dalam rangka melakukan pemajuan kebudayaan. Salahsatunya sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan, dengan melibatkan semua pihak. Melalui peran pemerintah yang memiliki kewenangan dan tentunya menggunakan kebudayaan sebagai fondasi dalam setiap penentuan kebijakan, diharapkan kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi dalam kebijakan tersebut menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan dan keterlibatan lintas sektor serta stakeholder terkait untuk membangun kerjasama sebagai langkah melakukan pemecahan permasalahan. 

12	Sektor Keagamaan	PERNYATAAN SIKAP DAN DEKLARASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERNYATAAN SIKAP DAN REKOMENDASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PADA HARI INI SELASA, 17 OKTOBER 2023 DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, KAMI PESERTA RAPAT KOORDINASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) SE - KALIMANTAN TIMUR MENYATAKAN : 1. MENGUATKAN PENGAMALAN NILAI – NILAI PANCASILA, UNDANG – UNDANG DASAR 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI); 2. BERTEKAD MENGAJAK KERUKUNAN, KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KEDAMAIAN DI BUMI KALIMANTAN TIMUR; 3. BERPERAN AKTIF DALAM MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG AMAN, DAMAI, HARMONIS DAN BERIMARTABAT SERTA MENJADI YANG CERDAS, MENOLAK SEGALA BENTUK POLITESASI SABA DAN POLITIK UANG; 4. MENDUKUNG SEPENUHNYA ASAS KEBERLAHSUNGKAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) DI KALIMANTAN TIMUR DAN SELESAI SESUAI TARGET YANG DITENTUKAN; 5. MENDORONG MEMPERCEPAT TERBITNYA PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI PENGANTI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 YANG DIDLANNYA MEMULI ADANYA PERATURAN TENTANG PENGATURAN PENDEKIAN RUMAH BAGAH, STRUKTUR ORGANISASI FKUB DARI PUSAT SAMPAI KE DAERAH; 6. MENINGKATKAN EDARAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR : 90/1697/2010 TANGGAL 25 NOPEMBER 2020 TENTANG PENDANAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM ANGARAN PENDAFTAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PENEGASAN / ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI PADA RAKORNAS FKUB SE – INDONESIA TAHUN 2020, DENGAN MEMBERIKAN BANTUAN DANA OPERASIONAL MINIMAL RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) UNTUK KABUPATEN/KOTA DAN RP. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) UNTUK FKUB PROVINSI;
----	------------------	--

Dengan rumusan:

Persentase kebijakan di bidang kesra yang ditindaklanjuti

Jumlah rumusan kebijakan yang disiapkan

Total kebijakan kesra yang menjadi isu strategis dalam satu tahun

$\times 100\%$

Pergub/Rekomendasi kebijakan 3 bagian yang disiapkan

Kebijakan yang akan ditindaklanjuti di 3 bagian (menyesuaikan kegiatan yang disusun dalam RKT)

$\times 100\%$

$= \frac{3}{3} \times 100\% = 100,00\%$

4) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:

- a) Jumlah Peraturan Gubernur yang telah diharmonisasi sebanyak 68 Dokumen;
- b) Jumlah Surat Keputusan sebanyak 909 Dokumen;
- c) Jumlah produk hukum yang telah didokumentasikan dan dipublikasikan sebanyak 977 Dokumen;
- d) Jumlah Perda dan Perkada Kabupaten/Kota sebanyak 379 Dokumen.

Rekapitulasi Produk Hukum Daerah Provinsi dan Produk Hukum Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi yang Diharmonisasi	68	Dokumen
2.	Draf Surat Keputusan	909	Dokumen
3.	Pendokumentasi Produk Hukum Daerah	977	Dokumen
4.	Jumlah Perda dan Perkada Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	379	Dokumen

Formulasi perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi} &= \frac{\text{Jumlah rancangan produk hukum diharmonisasi}}{\text{Total produk hukum yang akan dibuat}} \times 100\% \\ &= \frac{68+379}{440} \times 100\% \\ &= \frac{447}{440} \times 100\% = \mathbf{101,59\%} \end{aligned}$$

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.

1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):

- a) Adanya komitmen Kepala Daerah dengan Seluruh Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyampaikan Hasil Capaian Kinerja Kepala Dearah, hal tersebut dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Rapat persiapan penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b) Dukungan Pimpinan proses penyusunan LPPD Prov. Kaltim;
- c) Tersedianya Anggaran dalam melakukan tahapan Penyusunan LPPD sampai dengan pelaksanaan Evaluasi;
- d) Peran Aktif dan koordinasi yang baik antara Tim Penyusun LPPD Provinsi Kalimantan Timur, Tim Reviu (APIP Prov. Kaltim) dan SKPD Pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam proses penyusunan LPPD Prov. Kaltim;
- e) LPPD disampaikan melalui Sistem Aplikasi SILPPD, sehingga lebih memudahkan tim penyusun dalam mengiput data dukung.

2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:

- a) Peningkatan pengetahuan Perangkat Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kab/Kota tentang pedoman pelaksanaan kerja sama;
- b) Meningkatnya peran aktif dalam Sekretariat kerja sama sehingga makin memudahkan menindaklanjuti usulan kerja sama;
- c) Adanya komunikasi yang baik antara pemrakarsa baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Badan Usaha/swasta.

3) Persentasae kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:

Faktor Pendukung:

- a) Tersedianya dana/anggaran penunjang kegiatan;
- b) Tersedianya regulasi yang jelas;
- c) Telah disusunnya rencana kerja tahunan sub bagian;
- d) Tersedianya Sumber Daya Manusia.

Faktor Penghambat:

- a) Ketidakpatuhan dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun;
- b) Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan perencanaan kegiatan;
- c) Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia penyusunan hasil (*output/outcome*) kinerja.

4) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:

Faktor Pendukung:

- a) Kerjasama yang baik antara pemrakarsa dengan Biro Hukum dan kerjasama yang baik antara Biro Hukum dan Kemendagri;
- b) Dukungan pimpinan dalam percepatan penyerapan anggaran.

Faktor Penghambat:

- a) Kurang efektifnya waktu koordinasi antara pemrakarsa dengan Biro Hukum;
- b) Kegiatan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dalam DPA Biro Hukum sifatnya mem-*backup* kegiatan Kantor Wilayah Kemenkumham dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

f. Permasalahan.

1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):

- a) Masih kurangnya pemahaman terhadap IKK LPPD sehingga terjadi perbedaan persepsi terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD antara SKPD Pengampu IKK dengan Tim Reviu (APIP);
- b) Fitur atau konten pada Aplikasi SILPPD setiap tahunnya mengalami perubahan sehingga menghambat proses penginputan;
- c) Keterlambatan hasil Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPKD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga mempengaruhi capaian kinerja dalam penginputan laporan-laporan Kinerja Kepala Daerah lainnya.

2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:

- a) Kurangnya pemahaman dari Perangkat Daerah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Daerah lainnya yang mengajukan usulan kerja sama terhadap dasar dasar pengajuan kerja sama sehingga membuat proses kerja sama terhambat;
- b) Kurangnya pemahaman dari Badan Usaha/Swasta yang mengajukan usulan kerja terhadap dasar dasar pengajuan kerja sama sehingga membuat proses kerja sama terhambat;

- c) Kurangnya pegawai/staf yang membidangi kerja sama sehingga dua pekerjaan atau lebih dikerjakan satu orang sehingga membuat pekerjaan sedikit terlambat;
- d) Anggaran untuk kegiatan kerja sama dirasa kurang untuk melakukan koordinasi ke Pemerintah Kab/Kota dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi lainnya maupun Pemerintah Pusat.

3) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:

- a) Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disebabkan belum tersedianya dana di Triwulan I;
- b) Terdapat kegiatan yang konsep pertemuan masih belum mengacu pada tupoksi Biro, sehingga *output* kegiatan tidak optimal membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah dalam RPJMD;
- c) Tidak optimal dalam penyiapan rumusan bahan kebijakan;
- d) Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.

4) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:

- a) Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin tidak sepenuhnya dapat diserap secara optimal;
- b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah berkontrak dengan pemberi bantuan hukum dalam 1 tahun sehingga seluruh perkara yang telah ditangani mencaikan terlebih dahulu di Kanwil Kemenkumham jika tidak mencukupi baru diajukan ke Pemerintah Provinsi;
- c) Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin juga telah menganggarkan hal yang sama untuk Bantuan Hukum bagi masyarakat di wilayahnya.

g. Solusi dan Upaya.

1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):

- a) Melaksanakan kegiatan Rapat Asistensi Penyusunan LPPD yang melibatkan Tim Penyusun, Tim Reviu (APIP) dan SKPD Pengampu IKK dengan mengundang Narasumber dari Tim Nasional Kementerian Dalam Negeri RI, Hal ini untuk menyamakan persepsi terhadap IKK LPPD yang masih belum jelas;
- b) Mendorong Tim Nasional kementerian Dalam Negeri RI untuk Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dalam proses penginputan data dukung IKK LPPD kedalam system Aplikasi SILPPD;
- c) Memberi saran dan masukan kepada Tim Evaluasi dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan Hasil Kinerja Pemerintah Daerah agar tepat waktu.

2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:

- a) Memberi pemahaman kepada Badan Usaha/Swasta untuk tetap memberikan dokumen sesuai dengan peraturan pada saat mengusulkan kerja sama;
- b) Meningkatkan kompetensi pegawai dan memanfaatkan jumlah pegawai yang tersedia untuk tetap melaksanakan pekerjaan dan tetap berusaha untuk menambah jumlah pegawai dengan kompetensi yang memenuhi.
- c) Memaksimalkan anggaran yang tersedia agar kegiatan tetap berjalan.

3) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:

Solusi:

- a) Penguatan perencanaan untuk tahun selanjutnya;
- b) Penguatan Monev Kinerja per Triwulan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tersusun di RKT;
- c) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia guna mendukung pelaksanaan tugas Biro Kesra;
- d) Mendorong inovasi Sumber Daya Manusia dengan memberikan ruang bagi ASN/Non ASN untuk membuat inovasi terobosan di sub bagiannya masing-masing.

Upaya:

- a) Penyusunan RKT dan melakukan revisi jika terjadi pergeseran jadwal pelaksanaan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
- b) Penyusunan ToR Kegiatan mengacu pada tugas dan fungsi serta jelas tujuan yang akan didapat daerah kegiatan dimaksud;
- c) Memperkuat koordinasi antar individu, sub bagian dan kepala bagian serta dengan lintas bidang lainnya untuk memperoleh informasi yang kuat terkait kinerja dan dapat melakukan sinkronisasi kegiatan yang memerlukan dukungan bidang/sub bagian lain.

4) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:

- a) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Ham;
- b) Membangun jejaring dengan pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi;
- c) Memperbaiki formulasi anggaran kegiatan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Tahun 2024 dengan memprioritaskan bantuan pada tingkat gugatan untuk perkara perdata dan tingkat penuntutan untuk perkara pidana.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.7
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	80,00	96,63	120,78
3.	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	80,00	70,55	88,19

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.8
Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6-1)*100
1.	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	-	90,00	96,77	100,00	3,34
2.	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	-	98,40	97,24	96,63	-0,63
3.	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	-	74,13	64,30	70,55	9,72

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	80,00	96,63	120,78
3.	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	80,00	70,55	88,19

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

d. Analisis penjabaran data capaian.

1) **Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:**

- a) Biro Perekonomian memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian yang merupakan amanat dari pemerintah pusat untuk di tindaklanjuti di daerah dalam bentuk Surat Keputusan, Surat Edaran, dll.
- b) Rincian data terkait Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti TA. 2023 memiliki formulasi perhitungan sebagai berikut:

Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti =
$$\frac{\text{Realisasi koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang perekonomian}}{\text{Target koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang perekonomian}} \times 100\%$$

$$= \frac{39}{39} \times 100\% = 100,00\%$$

Rincian Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian

NO	TARGET	JUMLAH	NO	REALISASI	JUMLAH
1)	Koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi	4	1)	Koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi	4
-	High Level Meeting TPID Prov. Kaltim		-	High Level Meeting TPID Prov. Kaltim	
-	Rapat Koordinasi untuk pengendalian inflasi		-	Rapat Koordinasi untuk pengendalian inflasi	
2)	Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pupuk dan Pestisida	3	2)	Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pupuk dan Pestisida	3
-	Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Timur		-	Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Timur	
-	Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi		-	Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi	
3)	Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi dan LPG	3	3)	Koordinasi Dalam Rangka Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi dan LPG	3
-	Koordinasi Pengawasan Penyaluran LPG bersubsidi tabung 3 kg		-	Koordinasi Pengawasan Penyaluran LPG bersubsidi tabung 3 kg	
-	Koordinasi dalam Pengusulan Kuota BBM bersubsidi JBT-JBKP 2023		-	Koordinasi dalam Pengusulan Kuota BBM bersubsidi JBT-JBKP 2023	
-	Koordinasi dalam Pengusulan Kuota LPG bersubsidi tabung 3 kg 2023		-	Koordinasi dalam Pengusulan Kuota LPG bersubsidi tabung 3 kg 2023	
4)	Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah	1	4)	Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah (UMKM)	1
-	Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah		-	Koordinasi dan Sinkronisasi data bidang Usaha Kecil Menengah	
5)	Rapat Koordinasi Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro	1	5)	Rapat Koordinasi Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro (P3DN)	1
-	Rapat Persiapan pelaksanaan Rakor Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro		-	Rapat Persiapan pelaksanaan Rakor Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro	
-	Rapat Finalisasi pelaksanaan Rakor Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro		-	Rapat Finalisasi pelaksanaan Rakor Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro	
-	Rapak Koordinasi Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro		-	Rapak Koordinasi Fasilitasi Kebijakan Analisis Ekonomi Mikro	
6)	Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah	1	6)	Fasilitasi Kebijakan Ekonomi Mikro Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS)	1
-	Rapat Persiapan Tim KDEKS		-	Rapat Persiapan Tim KDEKS	
-	Kegiatan Sosialisasi KDEKS		-	Kegiatan Sosialisasi KDEKS	
7)	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10	7)	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10
-	Evaluasi Triwulan IV Tahun Buku 2022 dan Triwulan I, II, III Tahun Buku 2023 BUMD Kaltim		-	Evaluasi Triwulan IV Tahun Buku 2022 dan Triwulan I, II, III Tahun Buku 2023 BUMD Kaltim	
-	Perubahan Badan Hukum PD.MBS		-	Perubahan Badan Hukum PD.MBS	
-	Kajian KEK MBTK		-	Kajian KEK MBTK	
-	Perubahan Badan Hukum PD.SKS		-	Perubahan Badan Hukum PD.SKS	

NO	TARGET	JUMLAH	NO	REALISASI	JUMLAH
-	Perubahan Perda PT.Jamkrida		-	Perubahan Perda PT. Jamkrida	
-	Laporan Tahunana BUMD Kaltim		-	Laporan Tahunana BUMD Kaltim	
-	RKAP BUMD Kaltim		-	RKAP BUMD Kaltim	
-	Buku Profil		-	Buku Profil	
-	Aplikasi BUMD		-	Aplikasi BUMD	
-	FGD BUMD Kaltim		-	FGD BUMD Kaltim	
8)	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD	1	8)	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD	1
-	Sosialisasi Pembinaan dan Pengelolaan BLUD		-	Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD bidang Kesehatan	
			-	Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan BLUD bidang pendidikan (SMK)	
			-	Evaluasi pelaksanaan pasca dan pra BLUD	
			-	Pelaksanaan rapat koordinasi PPK BLUD	
			-	Sosialisasi dan Pembinaan di Kab/Kota	
9)	Pembentukan Tim Penilai Penerapan PPK BLUD Prov. Kaltim	1	9)	Pembentukan Tim Penilai Penerapan PPK BLUD Prov. Kaltim	1
-	SK Gubernur Kaltim		-	SK Gub Kaltim pembentukan tim penilai penerapan pengelolaan BLUD No.500K.147/2022 tanggal 1 Maret 2022	
10)	Penetapan PPK BLUD pada UPT SMK Negeri di Provinsi Kalimantan Timur	1	10)	Penetapan PPK BLUD pada UPT SMK Negeri di Provinsi Kalimantan Timur	1
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.438/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 1 Samarinda	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.439/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 1 Tanah Grogot	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.440/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 1 Bontang	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.441/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 3 Berau	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.442/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 2 Tanah Grogot	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.443/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 3 Balikpapan	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.444/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 2 Penajam Paser Utara	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.445/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 1 Penajam Paser Utara	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.446/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 5 Balikpapan	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.447/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 6 Balikpapan	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.448/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 4 Balikpapan	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.449/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 1 Balikpapan	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.450/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPT SMK Negeri 3 Penajam Paser Utara	
	Penetapan PPK BLUD pada UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur			Penetapan PPK BLUD pada UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur	
			-	SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.582/2023 tentang Penetapan PPK BLUD Pada UPTD Balai Benih Induk Tanaman dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	
11)	Koordinasi Dalam Penentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	1	11)	Koordinasi Dalam Penentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	1
-	Rapat Penyusunan Tarif bersama PD Perpamsi		-	Rapat Penyusunan Tarif bersama PD Perpamsi	
-	Rapat Penetapan Tarif bersama Gubernur/ Sekretaris Daerah		-	Rapat Penetapan Tarif bersama Gubernur/ Sekretaris Daerah	

NO	TARGET	JUMLAH	NO	REALISASI	JUMLAH
-	Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum		-	Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	
-	Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum		-	Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Gubernur terkait Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	
-	Sinkronisasi Penyusunan RKAP dalam Pengelolaan BUMD Air Minum se Kabupaten/Kota se Kaltim		-	Sinkronisasi Penyusunan RKAP dalam Pengelolaan BUMD Air Minum se Kabupaten/Kota se Kaltim	
12)	Koordinasi Dalam Rangka Rencana Pengelolaan SPAM Regional	1	12)	Koordinasi Dalam Rangka Rencana Pengelolaan SPAM Regional	1
-	Rapat Koordinasi Integrasi Pemipaan Jalur Air Minum Void ex Tambang Indominco		-	Rapat Koordinasi Integrasi Pemipaan Jalur Air Minum Void ex Tambang Indominco	
-	Monitoring Action Plan Pembangunan Intake Sumber Air Baku ex Tambang Indominco		-	Monitoring Action Plan Pembangunan Intake Sumber Air Baku ex Tambang Indominco	
13)	Monitoring Kebijakan Pengelolaan Limbah dan Sanitasi	1	13)	Monitoring Kebijakan Pengelolaan Limbah dan Sanitasi	1
-	Monev Pelaksanaan Implementasi Pasca Program PPSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur		-	Monev Pelaksanaan Implementasi Pasca Program PPSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur	
14)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian	1	14)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian	1
-	Pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan XVI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023		-	Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.83/2023 tentang Pembentukan Panitia Kontingen Kalimantan Timur Pekan Nasional Petani Nelayan XVI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	
			-	Fasilitasi Penerbitan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/476/EKO-III tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Persiapan Pekan Nasional Petani Nelayan XVI	
			-	Pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan XVI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berupa Rapat Koordinasi Persiapan dan Fasilitasi Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.3.1/K.83/2023 tentang Pembentukan Panitia Kontingen Kalimantan Timur Pekan Nasional Petani Nelayan XVI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	
-	Fasilitasi Koordinasi kebijakan sektor pertanian		-	Fasilitasi Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/14159/EK tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Review Masterplan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur	
			-	Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.452/2023 tentang Penetapan Pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	
			-	Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.60/2023 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Kalimantan Timur	
			-	Fasilitasi Penerbitan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.8.2/4377/EK tentang Upaya Penyelamatan Pangan	
-	Fasilitasi Koordinasi kebijakan sektor Perkebunan		-	Fasilitasi terkait penyelesaian konflik pada sektor Perkebunan	
			-	Fasilitasi rapat koordinasi Rencana Aksi Daerah Perkebunan	
			-	Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.309/2023 tentang Penetapan Petugas Pengawas Benih Perkebunan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2023	
-	Fasilitasi Koordinasi kebijakan sektor peternakan		-	Fasilitasi koordinasi dan evaluasi terkait Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 524/K.421/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Kalimantan Timur	
			-	Fasilitasi proses kebijakan pada sektor Peternakan	

NO	TARGET	JUMLAH	NO	REALISASI	JUMLAH
15)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kehutanan	1	15)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kehutanan	1
-	Fasilitasi Koordinasi kebijakan sektor Kehutanan		-	Fasilitasi Koordinasi terkait kegiatan pada sektor kehutanan	
			-	Fasilitasi proses kebijakan pada sektor Kehutanan	
			-	Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.628/2023 tentang Penetapan Pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	
			-	Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL) Provinsi Kalimantan Timur	
			-	Fasilitasi Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C)	
			-	Fasilitasi Focus Group Discussion (FGD) The International Symposium on Tropical Forestry and Environmental Science (ISTFES) dengan tema "Forest and Environmental Future Challenges and Opportunities on Climate Policies and Benefits"	
-	Fasilitasi pelaksanaan Program FCPF-CF di Provinsi Kalimantan Timur	2	-	Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Implementasi Program FCPF-CF di Provinsi Kalimantan Timur	2
			-	Focus Group Discussion (FGD) Tagging Sub Kegiatan di Kabupaten/Kota Tahun 2023 Dalam Rangka Persiapan Penyaluran Manfaat Program FCPF-CF	
			-	Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan <i>Workplan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund</i> (FCPF-CF)	
			-	Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.569/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Persetujuan Atas Informasi Awal Tanpa Paksaan Atau Free Prior and Informed Consent Provinsi Kalimantan Timur	
			-	Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.485/2023 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Kerangka <i>Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund</i> Provinsi Kalimantan Timur	
			-	Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.823/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembagian Manfaat Dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Kerangka <i>Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund</i> Provinsi Kalimantan Timur	
			-	Fasilitasi Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.824/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Kerangka <i>Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund</i> Provinsi Kalimantan Timur	
			-	Fasilitasi Penerbitan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat Dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan	
			-	Fasilitasi Rapat Koordinasi Awal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan FCPF-CF di Provinsi Kalimantan Timur	
			-	Fasilitasi Penerbitan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 500.4 /16085/EK tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kinerja Perangkat Daerah Terkait Perubahan Iklim Dalam Program <i>Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund</i> pada	

NO	TARGET	JUMLAH	NO	REALISASI	JUMLAH
				Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	
16)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan	1	16)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan	1
-	Fasilitasi Koordinasi Kebijakan sektor Kelautan dan Perikanan		-	Fasilitasi rapat koordinasi peluang retribusi sektor kelautan dan perikanan	
			-	Fasilitasi kegiatan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Mangrove Dalam Mendukung Program Penurunan Emisi di Kalimantan Timur	
			-	Fasilitasi proses kebijakan pada sektor kelautan dan perikanan	
17)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup #Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertambangan	1	17)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup #Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Pertambangan	1
-	Sosialisasi <i>Participating Interest</i> pada Wilayah Kerja Migas oleh Satgas PI		-	Sosialisasi <i>Participating Interest</i> pada Wilayah Kerja Migas oleh Satgas PI	
-	Fasilitasi Usulan Luas KBAK Sangkulirang-Mangkalihat		-	Fasilitasi Usulan Luas KBAK Sangkulirang-Mangkalihat	
-	Koordinasi dan Fasilitasi Permohonan Izin Pengalihan Jalan Provinsi Utuk Aktifitas Pertambangan		-	Koordinasi dan Fasilitasi Permohonan Izin Pengalihan Jalan Provinsi Utuk Aktifitas Pertambangan	
-	FGD Manajemen Resiko Pada Sektor Pertambangan		-	FGD Manajemen Resiko Pada Sektor Pertambangan	
18)	#Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup	1	18)	#Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup	1
-	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim		-	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim	
-	Penetapan Sempadan Danau Kaskade Mahakam		-	Penetapan Sempadan Danau Kaskade Mahakam	
-	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut		-	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	
19)	Fasilitasi Perizinan dan Non Perizinan Bid. Energi dan Air	1	19)	Fasilitasi Perizinan dan Non Perizinan Bid. Energi dan Air	1
-	Wilayah Usaha PT. Kariangau Power		-	Wilayah Usaha PT. Kariangau Power	
-	Wilayah Usaha PT. Kutai Rifenery Nusantara		-	Wilayah Usaha PT. Kutai Rifenery Nusantara	
-	Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah PT. Senyur Group		-	Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah PT. Senyur Group	
20)	Koordinasi Vertikal dan Horizontal	1	20)	Koordinasi Vertikal dan Horizontal	1
-	Fasilitasi Kerjasama Wilayah Usaha PT. Kayan Hidro Energi dan PT. Bumi Mas Argo ke Ditjen Ketenagalistrikan		-	Fasilitasi Kerjasama Wilayah Usaha PT. Kayan Hidro Energi dan PT. Bumi Mas Argo ke Ditjen Ketenagalistrikan	
-	Fasilitasi Kerjasama Wilayah Usaha PT. Kayan Hidro Energi dan PT. Bumi Mas Agro di Kab Kutim bersama Pemkab.		-	Fasilitasi Kerjasama Wilayah Usaha PT. Kayan Hidro Energi dan PT. Bumi Mas Agro di Kab Kutim bersama Pemkab.	
-	Fasilitasi Program Listrik Desa di Kaltim		-	Fasilitasi Program Listrik Desa di Kaltim	
21)	Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi dan Air	1	21)	Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi dan Air	1
-	PLTBG Paser		-	PLTBG Paser	
-	Rencana Penerapan PLTS Desa Muluy		-	Rencana Penerapan PLTS Desa Muluy	
-	PLTBG Kutim PT. Bumi Mas Agro (PT. BMA)		-	PLTBG Kutim PT. Bumi Mas Agro (PT. BMA)	
TOTAL TARGET		39	TOTAL REALISASI		39

2) **Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:**

- a) Pekerjaan Utama merupakan kegiatan-kegiatan prioritas yang masuk dalam Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Klaimantan Timur Tahun 2018-2023 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
- b) Total Kegiatan Lingkup Pekerjaan Utama adalah 544 Kegiatan;
- c) Total Kegiatan yang belum selesai adalah 43 Kegiatan;
- d) Total Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu adalah 501 Kegiatan;

e) Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu = $\frac{1088}{1126} \times 100\% = 96,63\%$

DATA PEKERJAAN UTAMA 2023

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PAKET		Jumlah Paket
		EPURCHASING	KONSTRUKSI	
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10	0	10
2	RSUD A. Wahab Syahrani	21	2	23
3	Badan Kepegawaian Daerah	1	0	1
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	1
5	Dinas Pariwisata	0	1	1
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	1	3
7	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0
8	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	18	19
8	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	0	2	2
8	Dinas Lingkungan Hidup	2	0	2
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	4	1	5
10	Sekretariat DPRD Provinsi	9	1	10
11	Badan Penghubung Provinsi	3	1	4
	Inspektorat	0	0	0
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	0	2
14	Dinas Kesehatan	1	1	2
15	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	31	0	31
16	RSJD. Atma Husada Mahakam	4	0	4
17	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	3	0	3
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	0	2
19	Dinas Perhubungan	9	2	11
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	450	68	518
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3	2	5
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	15	1	16
23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	151	102	253
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	0	2
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga	30	2	32
26	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5	9	14
27	Dinas Perkebunan	14	4	18
28	Dinas Kehutanan	45	10	55
29	Biro Umum	23	1	24
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4	1	5

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PAKET		Jumlah Paket
		EPURCHASING	KONSTRUKSI	
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	7	15
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	0	5
33	Dinas Sosial	2	1	3
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0
34	UPTD BLKI Balikpapan	2	0	2
36	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18	0	18
37	Badan Pendapatan Daerah	2	3	5
TOTAL		884	242	1126

3) Indeks tata kelola pengadaan:

Skor indeks tata kelola pengadaan (ITKP) tahun 2023 yang di keluarkan oleh LKPP adalah 70,55 atau 88,19% dari target yang telah di tetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh LKPP sesuai dengan indikator, bobot dan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan oleh LKPP, indikator tersebut antara lain:

a) Indikator pemanfaatan sistem pengadaan yang terdiri dari:

➤ **SIRUP**

Formulasi penghitungannya adalah Nilai RUP SIRUP di bandingkan dengan nilai belanja PBJ, basis data yang di gunakan adalah data RUP TA 2023 yang di tarik pada 1 april 2023 dengan skor maksimal 10 (sepuluh).

➤ **ePurchasing**

Formulasi penghitungannya adalah jumlah paket selesai dibandingkan dengan jumlah paket aktif untuk ePurchasing (katalog elektronik) dengan skor maksimal 4 (empat), basis datanya adalah data katalog elektronik TA 2022 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2023.

➤ **Non eTendering/non ePurchasing**

Formulasi penghitungannya adalah nilai realisasi di bandingkan dengan nilai RUP pengadaan langsung dan penunjukan langsung dengan skor maksimal 5 (lima), basis data yang di gunakan adalah data SPSE (transaksional dan pencatatan) dan RUP TA 2022 yang di tarik tanggal 31 Januari 2023.

➤ **eTendering**

Formulasi penghitungannya adalah nilai realisasi di bandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering dengan skor maksimal 5 (lima), basis data yang di gunakan adalah data realisasi dan RUP TA 2022 yang di tarik pada tanggal 31 Januari 2023.

Berdasarkan analisis capaian kinerja, beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target pada Indeks Tata Kelola Pengadaan, diantaranya:

1. Seluruh nilai ITKP Nasional menurun karena penambahan komponen pemanfaatan sistem pengadaan yang awalnya hanya SIRUP dan e-Tendering menjadi SIRUP, e-Purchasing, Non e-Tendering/Non e-Purchasing, e-Tendering, Toko Daring, dan e-Kontrak.
2. Pemenuhan komponen yang diminta seperti poin di atas, termasuk bukti dukung, masih terus diupayakan pemenuhannya.
3. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu (2022) yakni 64,30 maka, realisasi tahun ini (2023) yakni 70,55 ITKP Kalimantan Timur justru meningkat.

Perubahan Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

No	Indikator Tahun 2021	Bobot	No	Indikator Tahun 2022	Bobot
1	Pemanfaatan Sistem - SIRUP - e-Tendering	30%	1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan - SIRUP - e-Purchasing - non e-Tendering/ non e-Purchasing - e-Tendering - Toko Daring - e-Kontrak	30%
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM	30%	2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM	30%
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	40%	3	Tingkat Kematangan UKPBJ	40%

4. Target yang tertera pada RENSTRA 2019-2023 masih berdasarkan perhitungan komponen yang belum ada perubahan. Hal ini dipandang terlalu tinggi. Tahun 2023 memasuki tahun terakhir RENSTRA, sehingga target tidak dapat diubah lagi. Namun untuk RENSTRA 2024-2026 target ITKP telah disesuaikan.

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.

1) Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:

Faktor Pendukung:

- a) Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar Pemerintah Pusat/TPIP, Provinsi dan Kab/Kota serta pihak-pihak terkait/*stakeholder*;
- b) Potensi Sumber Daya Alam yang ada meliputi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan serta Energi dan Air;
- c) Potensi BUMD dan BULD yang ada meliputi sektor BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi serta BULD.

Faktor Penghambat:

- a) Kurang optimalnya pemanfaatan dana FCPF-CF;

- b) Belum optimalnya peran BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c) Tidak optimalnya koordinasi antar pihak terkait mengenai pendistribusian kuota BBM dan Tabung Gas 3kg.

2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:

Faktor Pendukung:

- a) Anggaran yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- b) Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- c) Penerapan Budaya Kerja dan mendorong inovasi untuk mencapai target kinerja;
- d) Pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia yang rutin dilakukan setiap tahun.

Faktor Penghambat:

- a) Belum tertibnya administrasi pelaksanaan pembangunan (dokumen administrasi teknis);
- b) Belum tertibnya pelaporan pelaksanaan pembangunan (operator TEPRa dalam melakukan *update* data realisasi);
- c) Belum terintegrasinya data administrasi pembangunan (antara aplikasi TEPRa/SIPD/Evdoren).

3) Indeks tata kelola pengadaan:

Faktor Pendukung:

- a) Sudah ada Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) model kematangan UKPBJ yang disusun oleh LKPP sebagai panduan dalam upaya mencapai level proaktif (level 3);
- b) Survey dilaksanakan secara elektronik sehingga memudahkan responden untuk mengisi kuesioner;
- c) Komitmen pimpinan yang selalu mendorong dan mengarahkan langkah setiap pelaksanaan kegiatan;
- d) Setiap kegiatan yang dilaksanakan, memberikan laporan sesuai dengan target indikator kinerja masing-masing, dan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap 6 bulan sekali (per semester) menghasilkan nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) sehingga akan tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 84%.

Faktor Penghambat:

- a) Pemenuhan bukti dukung yang dikirim ke LKPP tidak bisa diketahui hasilnya dalam waktu singkat, karena harus menunggu proses verifikasi dan validasi oleh tim LKPP;

- b) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia pengelola pengadaan barang jasa yang mengakibatkan jumlah paket dan jumlah SDM tidak sebanding;
- c) Sangat dibutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia pada Bagian Pengelolaan LPSE, terutama yang memiliki kemampuan dasar bidang IT/Informatika yang saat ini sangat diprioritaskan karena jumlah PNS yang dibawah oleh Bagian Pengelolaan LPSE hanya berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari (3 PNS JF Penyetaraan dan 1 PNS JF Pranata Komputer Mahir serta 2 PNS Pelaksana Administrasi LPSE);
- d) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya harus memperhatikan TKDN dan produk dalam negeri, sehingga barang yang dibutuhkan belum banyak tersedia di pasaran.

f. Permasalahan.

1) Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:

- a) Tingginya ketergantungan sembilan bahan pokok (sembako) dari luar daerah, peningkatan permintaan seiring perbaikan daya beli dan momentum pembangunan IKN serta dampak dari penurunan luas pertanian yang mengakibatkan resiko penurunan produktivitas pertanian;
- b) Belum tersedianya data yang update dan valid terkait dengan penerima manfaat/pengguna LPG Tabung 3 Kg (bersubsidi) khususnya Sektor UMKM;
- c) Belum dilaksanakan RUPS Pengesahan RKAP TB. 2024 semua BUMD Kaltim, Evaluasi TW IV 2023 menunggu selesainya RUPS RKAP TB. 2024, Perda BUMD KEK MBTK menunggu proses kajian akademik di Kemendagri, izin Pelabuhan KEK MBTK;
- d) Masih ada beberapa BUMD Air Minum di Kabupaten/Kota yang belum menyesuaikan tarif air minum;
- e) Pemahaman tentang BLUD yang masih kurang;
- f) Pelaksanaan program/kegiatan FCPF-CF menunggu proses harmonisasi antara KLHK, Kemenkeu, Kemendagri, BPD LH tentang mekanisme penyaluran manfaat/insentif carbon ke pemerintah desa terkait dengan penentuan APB Desa sehingga proses MoU antara BPD LH dengan lembaga perantara belum dapat dilaksanakan.

2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:

- a) Keterlambatan progress realisasi fisik dan keuangan SKPD;
- b) Belum selesainya pelaksanaan kegiatan SKPD yang mengakibatkan kegiatan harus lanjut ke tahun berikutnya;

- c) Belum terintegrasi data administrasi Pembangunan;
- d) Sumber Daya Manusia yang terbatas;

3) Indeks tata kelola pengadaan:

- a) Tidak mudahnya mengintegrasikan pengelolaan barang dan jasa di seluruh mata rantai proses pengadaan barang jasa dan berkolaborasi dengan berbagai pihak;
- b) Tidak mudahnya mengelola sistem informasi pengadaan yang sesuai dengan standar keamanan sistem informasi yang telah ditetapkan;
- c) Masih belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia pengadaan barang dan jasa sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja yang telah disusun.

g. Solusi dan upaya.

1) Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:

Solusi: optimalisasi, koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dan *stakeholder* terkait melalui rapat koordinasi, FGD serta monitoring dan evaluasi dalam rangka memperoleh data yang *update* dan *valid* sebagai referensi untuk menentukan arah kebijakan dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Upaya:

- a) Sinkronisasi Data UMKM antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b) Peningkatan Produksi Komoditas Pangan dan Optimalisasi Peran BUMD dalam proses Kerjasama Antar Daerah guna menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga tetap stabil;
- c) Adanya Penekanan dalam Peraturan dari Pergub dan Regulasi Keputusan Menteri agar Kepala Daerah dapat melakukan Penyesuaian Tarif Air Minum;
- d) Segera dilakukan RUPS Pengesahan RKAP TB. 2024, izin Pelabuhan KEK MBTK akan dikoordinasikan ke Kementerian terkait Bersama tim Sekretariat Dewan Kawasan;
- e) Sinergitas stakeholder terkait melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan mekanisme penyaluran manfaat/insentif.

2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:

- a) Melakukan pengendalian melalui Radalok dan Monev Lapangan;
- b) Pengembangan kebijakan terkait Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (percepatan penyusunan Pergub 71 Tahun 2013 dan penyampaian Rencana Anggaran Kas Tahun 2024);

- c) Pengembangan sistem pelaporan pengendalian administrasi secara terintegrasi dan berkolaborasi sehingga memudahkan akses dan analisis data secara efisien;
- d) Memperkuat sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembangunan dengan memanfaatkan teknologi dan Sumber Daya Manusia yang handal sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kemajuan Pembangunan.

3) Indeks tata kelola pengadaan:

- a) Mendorong pengelolaan proses pengadaan barang jasa terintegrasi dengan mata rantai proses pengadaan serta berkolaborasi dengan pihak terkait;
- b) Menerapkan SOP perencanaan dan mitigasi risiko pengadaan serta pelaporan untuk mendukung tercapainya target kegiatan pengadaan;
- c) Mengelola fungsi pengadaan barang jasa, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa untuk memastikan kebutuhan barang/jasa dapat terpenuhi dengan baik;
- d) Merencanakan kebutuhan personal UKPBJ dan pemenuhan Jabfung PPBJ;
- e) Melaksanakan pengembangan SDM berbasis kompetensi;
- f) Optimalisasi pengelolaan sistem informasi sesuai dengan standar layanan dan standar keamanan;
- g) Melakukan pengumpulan data melalui kuesioner terhadap pengguna layanan Biro PBJ;
- h) Menyelenggarakan kegiatan FGD/Diskusi PBJ dan kegiatan riset serta analisis pasar barang/jasa;
- i) Menyusun strategi pengadaan barang/jasa, evaluasi kewajaran harga dan pelaksanaan *e-purchasing*;
- j) *Onboarding* produk katalog lokal dan toko daring serta review persiapan pengadaan;
- k) Melakukan evaluasi tender dan non tender, koordinasi dengan Lembaga terkait dan monitoring pelaku usaha pada katalog lokal;
- l) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi SPSE bagi PP, Pokja dan PPKom dan penyedia;
- m) Melakukan koordinasi terkait kendala sistem dan pengelolaan sistem;
- n) Pengembangan aplikasi perencanaan pengadaan, aplikasi manajemen pengadaan, aplikasi kinerja pokja dan aplikasi *database* penyedia serta tenaga ahli;
- o) Mengadakan kegiatan P3DN dan penyebaran informasi kegiatan PBJ melalui media sosial/website;

- p) Meningkatkan pengawasan dan memberikan arahan terhadap setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim kerja;
- q) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pelaku usaha kecil, pembinaan KPA/PPKom dan pejabat pengadaan SKPD, rakor terkait kematangan UKPBJ, sosialisasi/bimtek dan pendampingan serta advokasi.

3. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.10
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	81,00	97,30	120,12
2.	Indeks Kelembagaan	Indeks	69,00	88,48	128,23

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.11
Perbangingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6-1)*100
1.	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	78,38	75,68	89,19	97,30	9,09
2.	Indeks Kelembagaan	Indeks	65,64 (pering kat 4)	68,14 (pering kat 4)	71,53 (pering kat 4)	88,48 (pering kat 4)	23,70

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	81,00	97,30	120,12

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2.	Indeks Kelembagaan	Indeks	69,00 (peringkat 4)	88,48 (peringkat 4)	128,23

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

d. Analisis penjabaran data capaian.

1) **Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):**

Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B (Baik) adalah 97,30 persen. Pencapaian ini terjadi karena 36 Perangkat Daerah telah memperoleh Predikat penilaian SAKIP memperoleh minimal B (Baik) atau meningkat sebesar 9,09 persen dari tahun 2022. Perangkat Daerah yang masih memperoleh Predikat Kinerja dibawah B (Baik) hanya Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Predikat CC (Cukup). Penjabaran data lebih terperinci dapat dilihat dari tabel berikut:

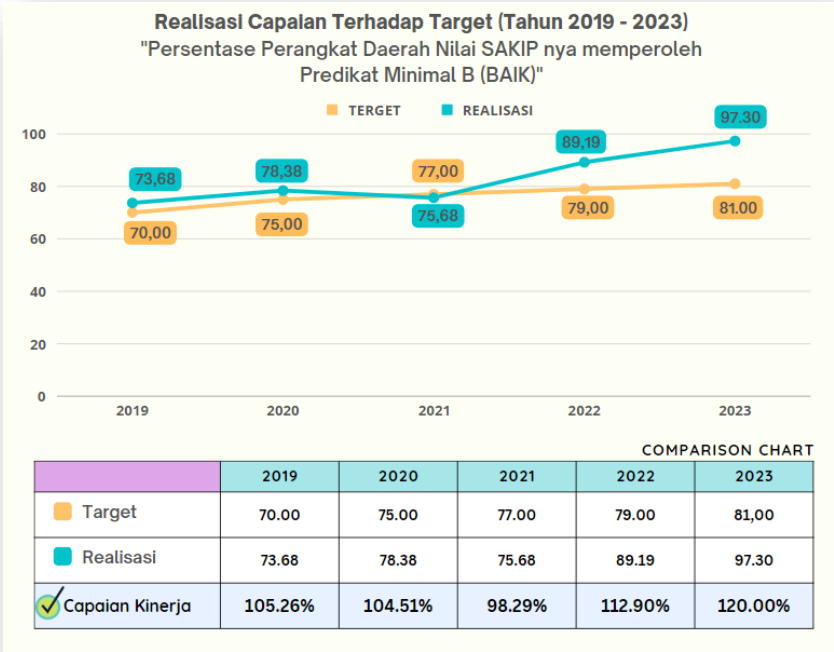
Tabel: Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Perencana an Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (20%)	Pelaporan Kinerja (10%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%)	Capaian Akuntabilitas Kinerja (20%)	Hasil Evaluasi	Predikat
1	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim	27	15,4	7,4	14,4	17,6	81,80	A
2	RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Prov. Kaltim	27,00	15,40	7,40	14,00	17,6	81,40	A
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim	21,60	16,00	7,40	14,80	18,80	78,60	BB
4	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	22,50	14,80	7,70	12,2	20,00	77,20	BB
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	24,00	14,80	8,00	14,4	15,20	76,40	BB
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Prov. Kaltim	22,60	14,80	7,40	13,80	17,60	76,10	BB
7	RSUD Dr. Kanujoso Djiatibowo Balikpapan Prov. Kaltim	22,20	16,00	7,70	15,00	15,20	76,10	BB
8	Dinas Peternakan Prov. Kaltim	21,60	18,00	10,00	14,80	11,20	75,60	BB
9	RSJD Atma Husada Mahakam Prov. Kaltim	23,10	15,40	7,40	14,40	15,20	75,50	BB
10	Inspektorat Prov. Kaltim	22,20	16,00	9,00	14,00	13,60	74,80	BB
11	Sekretariat Daerah	22,20	14,80	7,70	14,0	15,20	73,90	BB
12	Badan Penghubung Prov. Kaltim	27,00	15,40	6,60	11,0	13,60	73,60	BB
13	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	21,60	15,40	8,00	14,80	13,60	73,40	BB
14	Dinas Kesehatan Prov. Kaltim	22,20	15,40	6,40	14,0	15,20	73,20	BB
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim	21,30	14,80	6,20	12,8	17,60	72,70	BB
16	Dinas Pariwisata Prov. Kaltim	21,60	13,20	6,10	14,00	17,60	72,50	BB
17	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim	24,00	12,60	6,40	14,20	15,20	72,40	BB
18	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim	21,60	11,20	6,7	13,2	18,80	71,50	BB
19	Dinas Sosial Prov. Kaltim	25,50	14,20	5,90	11,00	14,80	71,40	BB
20	Sekretariat DPRD	23,10	14,80	6,40	14,8	11,20	70,30	BB
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	22,20	14,80	6,10	11,8	15,20	70,10	BB
22	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim	22,20	14,80	6,10	11,8	15,20	70,10	BB
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim	21,30	15,40	6,20	11,8	15,20	69,90	B

No.	Perangkat Daerah	Perencana an Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (20%)	Pelaporan Kinerja (10%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%)	Capaian Akuntabilitas Kinerja (20%)	Hasil Evaluasi	Predikat
24	Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	21,60	14,80	7,10	12,60	13,60	69,70	B
25	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	21,60	13,20	5,90	12,20	15,20	68,10	B
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim	21,60	15,40	7,40	12,20	11,2	67,80	B
27	Badan Pemberdayaan Masy. dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim	20,70	13,80	6,30	12,20	14,00	67,00	B
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim	20,70	14,80	6,10	14,0	11,20	66,80	B
29	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim	21,60	11,80	6,30	12,20	14,00	65,90	B
30	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim	22,20	14,80	6,10	11,0	11,20	65,30	B
31	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim	21,60	13,80	6,40	13,40	10,00	65,20	B
32	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim	20,70	13,80	6,30	9,20	15,20	65,20	B
33	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim	19,80	12,60	6,40	11,0	15,20	65,00	B
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim	20,70	14,40	7,70	11,8	10,00	64,60	B
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22,20	13,80	6,30	7,6	14,00	63,90	B
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim	21,60	13,80	5,60	9,00	11,20	61,20	B
37	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim	18,90	10,60	5,60	11,8	11,20	58,10	CC
	Rata-Rata Hasil Penilaian	22,30	14,45	6,86	12,74	14,53	70,87	BB

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat A (Memuaskan) sebanyak 2 Perangkat Daerah, Predikat BB (Sangat Baik) sebanyak 20 Perangkat Daerah, Predikat B (Baik) sebanyak 14 Perangkat Daerah dan 1 Perangkat Daerah memperoleh Predikat CC (Cukup). Rata-rata hasil dari evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah 70,87.

Perkembangan Trend pencapaian kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



2) Indeks Kelembagaan:

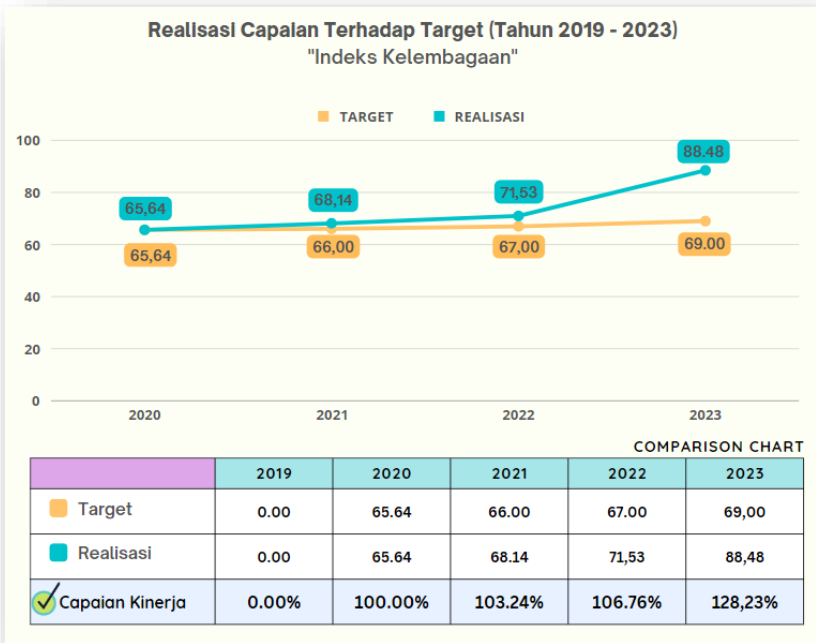
Indeks Kelembagaan dari hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sesuai dengan PermenPANRB nomor 20 tahun 2018 adalah 88.48 (Peringkat 5), hasil ini dapat dilihat secara terperinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel: Hasil Penilaian Indeks Kelembagaan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH NILAI DIMENSI STRUKTUR	JUMLAH NILAI DIMENSI PROSES	SKOR PENILAIAN	PERINGKAT KOMPOSIT
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	50,000	48,929	98,929	PERINGKAT 5
2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48,611	50,000	98,611	PERINGKAT 5
3	Badan Pendapatan Daerah	49,148	48,750	97,898	PERINGKAT 5
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	47,758	49,286	97,044	PERINGKAT 5
5	Dinas Perhubungan	47,222	48,601	95,823	PERINGKAT 5
6	RS Mata	46,032	49,500	95,532	PERINGKAT 5
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	45,489	49,500	94,989	PERINGKAT 5
8	Dinas Perkebunan	47,338	46,583	93,922	PERINGKAT 5
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	44,981	47,250	92,231	PERINGKAT 5
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44,347	47,417	91,764	PERINGKAT 5
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	44,024	47,119	91,143	PERINGKAT 5
12	Dinas Pemuda Dan Olahraga	42,076	49,000	91,076	PERINGKAT 5
13	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	44,463	46,098	90,561	PERINGKAT 5
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat	44,722	45,250	89,972	PERINGKAT 5
15	RSJD Atma Husada Mahakam	43,037	46,682	89,718	PERINGKAT 5
16	Sekretariat Daerah	44,247	44,766	89,013	PERINGKAT 5
17	Dinas Kependudukan,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47,420	41,202	88,622	PERINGKAT 5
18	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	41,182	46,643	87,824	PERINGKAT 5
19	Dinas Kehutanan	41,996	45,676	87,672	PERINGKAT 5
20	Inspektorat	39,978	47,500	87,478	PERINGKAT 5
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	43,321	43,607	86,928	PERINGKAT 5
22	Sekretariat DPRD	47,474	39,333	86,807	PERINGKAT 5
23	Badan Penghubung	44,474	42,113	86,588	PERINGKAT 5
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan	44,276	42,265	86,541	PERINGKAT 5
25	Dinas Sosial	44,078	42,449	86,527	PERINGKAT 5
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	44,661	41,512	86,173	PERINGKAT 5
27	RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo	38,353	47,536	85,889	PERINGKAT 5
28	RSUD KORPRI	41,858	43,702	85,561	PERINGKAT 5
29	Dinas Kesehatan	42,182	42,994	85,176	PERINGKAT 5
30	Badan Kepegawaian Daerah	43,101	41,690	84,791	PERINGKAT 5
31	Dinas Pariwisata	44,724	39,241	83,965	PERINGKAT 5
32	RSUD A. W. Sjahranie	39,758	44,095	83,853	PERINGKAT 5
33	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	44,428	39,369	83,797	PERINGKAT 5
34	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM	38,173	45,473	83,647	PERINGKAT 5

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH NILAI DIMENSI STRUKTUR	JUMLAH NILAI DIMENSI PROSES	SKOR PENILAIAN	PERINGKAT KOMPOSIT
35	Dinas Lingkungan Hidup	39,411	44,095	83,506	PERINGKAT 5
36	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	40,855	41,009	81,864	PERINGKAT 5
37	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	40,185	40,940	81,126	PERINGKAT 5
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36,802	44,018	80,820	PERINGKAT 5
39	Satuan Polisi Pamong Praja	38,897	38,286	77,183	PERINGKAT 4
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur		43,617	44,858	88,476	PERINGKAT 5

Perkembangan trend Indeks Kelembagaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.

1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):

Faktor-faktor keberhasilan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja dalam perolehan Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Sebagian besar Perangkat Daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi internal pencapaian kinerja secara berkala;
- b) Perangkat Daerah telah menyusun Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja;
- c) Sebagian Perangkat Daerah telah menerapkan reward dan punishment terhadap pencapaian kinerja secara internal.

2) Indeks Kelembagaan:

Faktor-faktor keberhasilan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan pada Perangkat Daerah;
- b) Pemahaman terhadap pernyataan setiap dimensi penilaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- c) Kepatuhan dalam pemenuhan bukti dukung yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

f. Permasalahan.

1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):

Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup. Hal tersebut berpengaruh pada penjejangan kinerja (*cascading*), pengukuran kinerja, perjanjian kinerja, monitoring capaian kinerja dan pelaporan kinerja.

2) Indeks Kelembagaan:

Masih ada Perangkat Daerah yang belum melakukan pemenuhan terhadap variabel berdasarkan variabel Indikator Kematangan Organisasi dan Indeks Kelembagaan serta bukti dukung yang harus dipenuhi dalam pemenuhan penilaian.

g. Solusi dan upaya.

1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):

- a) Melakukan fasilitasi penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi dan Monitoring Evaluasi secara berkala;
- c) Pendampingan dalam penyusunan logical framework dalam menyusun penjejangan Kinerja;
- d) Memasukan komponen pencapaian SAKIP Perangkat Daerah didalam komponen tunjangan kinerja sehingga setiap pegawai memiliki tanggungjawab dalam pencapaian kinerja organisasi.

2) Indeks Kelembagaan:

- a) Melakukan sosialisasi tentang pemenuhan dimensi-dimensi yang menjadi variabel penilaian dalam Indeks Kelembagaan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018;
- b) Melakukan pendampingan dalam pengisian atau pemenuhan bukti dukung dalam menjawab evaluasi kelembagaan.

4. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.13
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	71,00	87,06	122,62
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	77,80 (B/Baik)	84,26 (B/Baik)	108,3
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77,50	86,29	111,34

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.14
Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 s/d 2022 dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6-1)*100
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	62,34	72,67	85,11	87,06	2,29
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	81,00	79,81	83,38	84,26	1,08
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	83,00	85,24	85,78	86,29	0,59

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	71,00	87,06	122,62
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	77,80	84,26	108,3

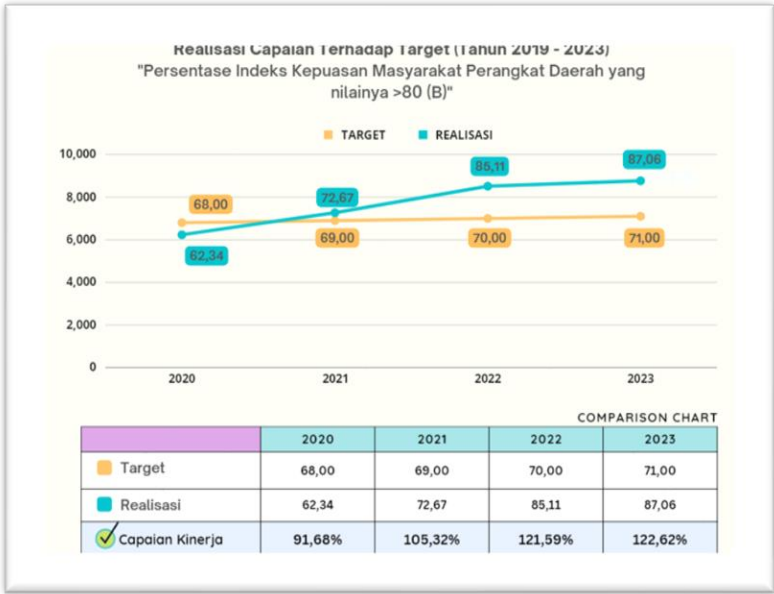
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77,50	86,29	111,34

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

d. Analisis penjabaran data capaian.

1) **Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):**

Dari 85 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menyampaikan Survei, ada 74 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang nilai Indeksnya diatas 80,00. Pencapaian ini setiap tahun mengalami trend positif, dan pada tahun 2023 capaian kinerja yang dicapai sebesar 122.62%. Gambaran capaian dari tahun 2020 sampai dengan 2023 bisa dilihat dalam grafik sebagai berikut:



2) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:**

Tujuan pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner digital yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan (Persyaratan, Prosedur, Jangka Waktu, Tarif, Produk, Kompetensi, Perilaku, Pengaduan, Sarana dan Prasarana) sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil dari pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah didapati hasil rata-rata per unsur pada Semester 1 Tahun 2023 sebesar 84,37 (B atau Baik) yang dapat dilihat pada analisis data sebagai berikut:

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	61	39%
		PEREMPUAN	24	61%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	1	1,18%
		SLTA	45	52,94%
		DIII	0	0%
		S1	35	41,18%
		S2	3	3,53%
		S3	1	1,18%
3	PEKERJAAN	PNS	24	28,24%
		TNI	1	1,18%
		SWASTA	2	2,35%
		WIRUSAHA	47	55,29%
		LAINNYA	11	12,94%

Detail Nilai SKM Per Unsur Semester I

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,39	3,42	3,31	3,41	3,31	3,38	3,49	3,34	3,62
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	84,37 (B atau Baik)								

Hasil dari pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah didapati hasil rata-rata per unsur pada Semester 2 Tahun 2023 sebesar 84,15 (B atau Baik) yang dapat dilihat pada analisis data sebagai berikut:

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	53	62%
		PEREMPUAN	32	38%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	34	40%
		DIII	0	0%
		S1	44	51,76%
		S2	7	8,24%
		S3	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	43	50,59%
		TNI/POLRI	6	7,05%
		SWASTA	26	30,59%
		WIRUSAHA	10	11,76%
		LAINNYA	0	0%

Detail Nilai SKM Per Unsur Semester II

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	85,88	87,94	83,53	84,71	80,88	84,12	85,59	81,76	90,59
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	84,15 (B atau Baik)								

Dari kedua perhitungan kinerja setiap semester didapatkan rata-rata yang menjadi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah Tahun 2023 sebesar **84,26**.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:

Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester I yang diikuti oleh 98 responden, dengan hasil sebesar **86,280** (mutu pelayanan A atau dikategorikan Sangat Baik), dapat dilihat di bawah ini:

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
8	4	3	3	3	4	4	4	4	4	
9	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
11	3	3	3	3	3	3	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	3	3	3	3	3	3	3	2	3	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
16	4	3	3	4	3	3	3	3	3	
17	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
24	4	3	4	4	3	4	3	4	4	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
26	3	3	3	4	3	4	4	4	4	
27	4	3	3	4	3	4	3	3	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
30	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
31	3	3	3	4	4	4	3	4	4	
32	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	3	4	4	4	3	4	3	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
36	4	4	3	4	3	4	3	3	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
38	4	3	3	4	4	3	3	3	4	
39	4	3	3	4	4	3	3	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
41	3	4	4	3	4	4	3	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
43	3	4	4	4	3	3	3	4	4	
44	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
45	3	4	4	4	4	4	3	3	4	
46	4	4	3	3	3	3	3	3	3	
47	4	4	4	4	4	3	3	4	3	
48	4	4	4	4	4	3	3	4	3	

49	4	4	4	4	4	3	3	4	3	
50	3	4	4	3	4	3	3	4	3	
51	4	4	4	4	4	3	3	4	3	
52	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
53	4	4	4	4	4	4	3	4	3	
54	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
55	4	4	4	4	4	4	3	3	3	
56	4	4	4	3	4	4	3	3	3	
57	4	4	4	3	4	4	3	3	3	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
59	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
62	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
63	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
64	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
65	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
66	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
67	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
68	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
69	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
72	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
73	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
77	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
78	3	3	3	3	3	4	4	3	2	
79	4	3	4	4	4	4	4	4	3	
80	3	2	4	3	2	3	3	4	3	
81	4	4	3	4	4	3	4	4	3	
82	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
83	3	3	3	4	3	3	3	2	3	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
85	4	4	3	4	3	3	3	3	4	
86	4	4	3	4	3	3	4	4	4	
87	3	4	4	4	3	4	4	4	4	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
90	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
91	3	3	3	3	3	4	3	4	3	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
93	3	3	3	3	4	4	4	4	3	
94	3	3	3	2	3	3	3	2	3	
95	3	4	3	3	3	4	3	3	3	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
97	3	1	4	4	4	4	4	2	3	
98	4	4	4	3	3	3	3	4	3	
99										
100										
101										
ΣNilai / Unsur	343	343	337	345	338	338	325	335	343	
NRR / Unsur	3.500	3.500	3.439	3.520	3.449	3.449	3.316	3.418	3.500	
NRR tertbg/ unsur	0.389	0.389	0.382	0.391	0.383	0.383	0.368	0.379	0.389	*) 3.451
IKM Unit pelayanan										**) 86.280

Keterangan:

- U1 s.d U = Unsur-Unsur Pelayanan
- NRR = Nilai Rata-Rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR tertimbang x 25
- NRR Per U = $\frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$
- NRR tertimbang = $\frac{\text{NRR per unsur}}{\text{unsur}} \times 111$

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.500
U2	Prosedur	3.500
U3	Waktu Pelayanan	3.439
U4	Biaya/Tarif	3.520
U5	Produk Layanan	3.449
U6	Kompetensi Pelaksana	3.449
U7	Perilaku Pelaksana	3.316
U8	Kualitas Sarana & Prasarana	3.418
U9	Penanganan Pengaduan	3.500

IKM UNIT PELAYANAN: 86,280

- Mutu Pelayanan :
- A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
 - B (Baik) : 62,51 - 81,25
 - C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
 - D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75
- Kategori Mutu Layanan
(Sangat Baik)

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV. KALTIM
SEMESTER I TAHUN 2023

SEMESTER I 86,280	RESPONDEN :	
	Jumlah	: 98 Orang
	Jenis Kelamin	: L=66 P=32
	Pendidikan	:
	S1	: 57 Orang
	SMA	: 25 Orang
	D3	: 4 Orang
	S2	: 3 Orang
	SMA, S1	: 2 Orang
	D4	: 1 Orang
	SD	: 1 Orang
	S3	: 1 Orang
	SMP	: 1 Orang
	S2, S3	: 1 Orang
	SMA, S1, S2	: 1 Orang
Periode Survei = Januari s/d Juni 2023		
Semester I		

Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester II yang diikuti oleh 120 responden, dengan hasil sebesar **86,303** (mutu pelayanan A atau dikategorikan Sangat Baik), dapat dilihat di bawah ini:

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
9	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

11	4	3	3	3	3	3	4	3	4	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
13	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
14	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
15	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
18	3	3	3	2	2	2	3	3	3	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
24	3	3	3	2	3	3	3	3	4	
25	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
26	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
32	3	3	3	4	3	3	3	2	3	
33	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
34	3	4	4	4	3	3	3	3	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
37	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	3	4	4	4	3	4	4	
41	3	3	4	4	3	3	4	3	4	
42	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
43	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
44	3	4	3	4	4	4	3	3	4	
45	3	3	4	3	3	3	3	3	4	
46	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
47	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
48	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
49	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
50	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
51	3	3	3	3	4	4	4	4	3	
52	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
54	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
55	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
56	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
57	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
59	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
60	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
61	3	3	3	3	3	3	3	2	3	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
64	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
65	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
66	3	3	4	4	3	4	3	2	4	
67	4	4	3	3	3	4	3	4	4	
68	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
71	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
72	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
74	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
75	3	3	3	4	3	3	4	3	4	

76	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
77	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
79	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
80	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
81	3	4	3	4	3	3	4	3	4	
82	4	4	3	3	3	3	3	3	4	
83	4	4	4	3	3	3	3	3	4	
84	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
85	4	4	3	4	3	3	4	3	4	
86	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
87	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
88	4	3	3	3	3	3	3	3	4	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
90	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
91	3	3	3	4	3	4	4	3	4	
92	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
93	3	3	3	3	3	3	4	4	4	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
95	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
97	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
98	4	3	4	4	3	4	4	4	4	
99	3	3	3	4	3	3	4	3	3	
100	3	3	2	4	3	3	3	3	3	
101	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
103	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
104	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
105	4	4	4	4	3	3	3	3	4	
106	3	4	4	4	3	3	3	2	4	
107	4	3	4	3	4	3	3	3	3	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
110	3	3	4	4	4	3	3	3	4	
111	3	3	4	4	3	3	3	3	3	
112	4	3	3	3	4	3	3	3	4	
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
114	3	3	4	3	3	3	3	4	3	
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
117	4	3	4	3	4	4	4	4	4	
118	4	4	4	3	4	3	3	4	3	
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ΣNilai /Unsur	402	404	401	450	401	404	409	401	460	
NRR / Unsur	3.350	3.367	3.342	3.750	3.342	3.367	3.408	3.342	3.833	
NRR tertbg/ unsur	0.372	0.374	0.371	0.416	0.371	0.374	0.378	0.371	0.426	*) 3.452
IKM Unit Pelayanan										**) 86.303

Keterangan:

- U1 s.d U = Unsur-Unsur Pelayanan
- NRR = Nilai Rata-Rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR tertimbang x 25
- NRR Per U = $\frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$
- NRR tertimbang = $\frac{\text{NRR per unsur}}{\text{unsur}} \times 111$

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.350
U2	Prosedur	3.367
U3	Waktu Pelayanan	3.342
U4	Biaya/Tarif	3.750
U5	Produk Layanan	3.342
U6	Kompetensi Pelaksana	3.367
U7	Perilaku Pelaksana	3.408
U8	Kualitas Sarana & Prasarana	3.342
U9	Penanganan Pengaduan	3.833

IKM UNIT PELAYANAN: 86,303

- Mutu Pelayanan :**
- A** (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
 - B** (Baik) : 62,51 - 81,25
 - C** (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
 - D** (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75
- Kategori Mutu Layanan
(Sangat Baik)

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV. KALTIM
SEMESTER II TAHUN 2023**

SEMESTER II 86,303	RESPONDEN :
	Jumlah : 120 Orang Jenis Kelamin : L=59 P=61 Pendidikan : S1 : 74 Orang SMA : 22 Orang D3 : 3 Orang S2 : 19 Orang S3 : 2 Orang Periode Survei = Juli s/d Desember 2023 Semester II

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.

1) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):

Faktor-faktor mendukung keberhasilan pencapaian terhadap nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan;
- b) Sebagian besar Perangkat Daerah telah memiliki Inovasi Pelayanan Publik untuk mendukung layanan yang diselenggarakan.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:

Faktor Pendukung:

- a) Adanya dukungan pada alokasi anggaran;
- b) Dukungan pelaksanaan kegiatan dari pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur).

Faktor Penghambat:

- a) Padatnya Kunjungan Kerja Tamu Pimpinan dan Pemerintah Provinsi dengan jadwal yang tidak terprediksi;
- b) Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c) Kurang optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:

Faktor Pendukung:

- a) Komitmen pimpinan terhadap penyelenggaraan kegiatan;
- b) Anggaran yang memadai penunjang kegiatan;
- c) *Teamwork* dan *team building* yang baik;
- d) Indikator yang telah ditentukan memenuhi kriteria SMART-C (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously-improved*).

Faktor Penghambat:

- a) Cascading kurang tepat, kurang memiliki keterkaitan sebab akibat (*casuality*) serta kurang memiliki kekuatan sinergitas (*alignment*);
- b) Kurang cermatnya dalam menetapkan target kinerja;
- c) Penyusunan aliran kas tertumpuk pada Trwiluan I, II dan III.

f. Permasalahan.

1) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):

- a) Masih ada unit layanan yang belum sesuai ketentuan menyusun standar pelayanan;
- b) Standar pelayanan yang disusun belum dijalankan secara konsisten;
- c) Masih ada pelayanan yang diberikan diluar SOP yang telah ditetapkan;
- d) Inovasi pelayanan yang belum optimal;
- e) Tindak lanjut terhadap hasil pengaduan yang belum optimal;
- f) Sarana dan prasarana menunjang layanan yang belum optimal.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:

- a) Kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemberi layanan pada pengguna layanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim;
- b) Tingginya mobilitas pelayanan pada Biro Umum khususnya pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretaris Daerah khususnya tamu-tamu Pimpinan yang tidak terencana atau tidak terprediksi;
- c) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan dan pendapatan Biro Umum Setda Prov. Kaltim.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:

- a) Belanja modal yang dikebut pelaksanaan dan realisasinya tertumpu/terpusat pada Triwulan IV;
- b) Kurangnya Sumber Daya Aparatur pada Bagian Protokol dan MKP;
- c) Adanya kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKA/DPA Biro Adpim (SPIP Maturitas, PPRG Lingkup Setda, Coaching Clinic Cascading Setda, dan anggaran yang tidak mendukung tahapan-tahapan perencanaan).

g. Solusi dan upaya.

1) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):

- a) Melakukan fasilitasi/asistensi SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b) Evaluasi/reviu SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- c) Melakukan peningkatan kapasitas Standar Pelayanan (SP);
- d) Melakukan Fasilitasi / Asistensi Standar Pelayanan (SP).

2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:

Solusi:

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur pemberi layanan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
- b) Dukungan anggaran yang penuh oleh Pimpinan, untuk mengcover pelayanan Pimpinan dan pelayanan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan dan pendapatan Biro Umum Setda Prov. Kaltim.

Upaya:

- a) Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi internal dan eksternal sehingga pelaksanaan pelayanan dapat terlaksana lebih maksimal;
- b) Penguatan terhadap perencanaan dan penganggaran serta kegiatan Biro Umum dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran tahun 2023;
- c) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk PNS dan Non PNS melalui pelatihan/bimbingan teknis/FGD/sosialisasi;

- d) Melaksanakan evaluasi terkait capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan per triwulan;
- e) Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan kepada pimpinan serta perangkat daerah pengguna layanan Biro Umum.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:

Solusi:

- a) Penguatan sinergitas 3 bagian pada Biro Adpim melalui silaturahmi, dialog kinerja, rapat rutin dan *family gathering*;
- b) Memotivasi staf agar kreatif dan inovatif serta kolaboratif (*squad team*) sebagai budaya kerja Biro Adpim;
- c) *In house training/coaching clinic* dengan mendatangkan narasumber yang kompeten;
- d) Penerapan kerjasama sebagai faktor utama dalam melayani pimpinan serta penerapan sikap perilaku dan etika dalam pekerjaan;
- e) Biro Adpim akan melakukan evaluasi kembali dalam menyusun aliran kas untuk tahun 2024

Upaya:

- a) Meningkatkan peran dan fungsi Protokol dan MKP sebagai pelayanan Biro Adpim;
- b) Pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan dan kepegawaian yang tepat waktu dan berkualitas;
- c) Penguatan SDM pada Biro Adpim dengan melalui pelatihan, *coaching clinic* dan bimbingan teknis;
- d) Penguatan sistem kerja sesuai dengan SOP yang telah ditentukan;
- e) Memperbanyak dialog kinerja lingkup Adpim, terutama dalam menentukan target (ekspektasi pimpinan) agar beban pekerjaan merata;
- f) Perbaikan cascading kinerja dan target kinerja pada DPA/RKA dan Evdoren;
- g) Akan dilakukan kembali perumusan indikator kinerja dalam mendukung RPD yang akan dijabarkan pada RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026;
- h) Pengisian data e-Kinerja dan e-SAKIP secara rutin dan terjadwal.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3-4
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	106,03	81,62	24,41
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	101,10	82,14	18,96
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik	124,18	85,12	39,06
4.	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	114,09	92,46	21,63

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.17
Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5=4/3*100
Sasaran 1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
1.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	17.500.311.482	17.217.086.792	98,38
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	95.184.734.700	74.136.024.338	77,89
3.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.620.710.000	4.396.790.477	95,15
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan				
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	16.626.589.900	11.692.484.168	70,32
2.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	7.445.751.900	6.739.102.938	90,51
3.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	9.238.197.150	8.928.549.156	96,65
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik				
1.	Program Penataan Organisasi	5.420.217.500	4.613.658.334	85,12
Sasaran 4: Meningkatkan kualitas layanan pemerintah				
1.	Program Penataan Organisasi	1.109.696.500	1.009.283.747	90,95
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	277.205.774.903	254.154.761.302	91,68
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	34.351.189.913	33.916.810.261	98,74

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

7. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

Realisasi Kinerja Provinsi tidak dapat dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah dikarenakan indikator kinerja level Perangkat Daerah tidak akan mungkin sama dengan indikator kinerja level Gubernur/Provinsi, apabila sama maka tidak akan menunjukkan *cascade* kinerja.

D. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,15	3,51	111,43	Rp 1.149.622.000	Rp 1.147.151.716	99,79
		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	95,00	95,00	100,00	Rp 2.784.532.813	Rp 2.725.810.576	97,89
		Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	90,00	100,00	111,11	Rp 98.302.063.322	Rp 76.766.396.296	78,09
		Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	100,00	101,59	101,59	Rp 7.046.874.193	Rp 6.781.802.674	96,24
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	Rp 18.765.401.038	Rp 13.708.281.232	73,05
		Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	80,00	92,09	115,11	Rp 14.468.515.244	Rp 13.912.068.479	96,15
		Indeks tata kelola pengadaan	80,00	70,55	88,19	Rp 10.904.170.960	Rp 9.900.945.618	90,80
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	81,00	97,30	120,12	Rp 2.766.439.500	Rp 2.293.090.763	82,89
		Indeks Kelembagaan	69,00	88,48	128,23	Rp 2.653.778.000	Rp 2.320.567.571	87,44
4.	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	71,00	87,06	122,62	Rp 1.109.696.500	Rp 1.009.283.747	90,95
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	77,80	84,26	108,30	Rp 277.205.774.903	Rp 254.154.761.302	91,68
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Pimpinan	77,50	86,29	111,34	Rp 34.351.189.913	Rp 33.916.810.261	98,74

Sumber: data Biro-biro tahun 2023 diolah

2. Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Realisasi anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Realisasi Kinerja dan Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp.) Pagu	(Rp.) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				<u>22.112.606.168</u>	<u>21.677.182.924</u>	<u>98,03</u>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.612.294.686	4.460.096.131	96,70	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	5.696.000	5.649.500	99,18	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	5.696.000	5.649.500	99,18	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	151.800.000	143.640.000	94,62	
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	151.800.000	143.640.000	94,62	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	79.891.500	79.790.900	99,87	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	7 Orang	100,00	79.891.500	79.790.900	99,87	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	2.222.594.666	2.189.644.116	98,52	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100,00	82.000.000	76.637.200	93,46	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100,00	45.290.390	35.512.980	78,41	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	100,00	2.095.304.276	2.077.493.936	99,15	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00	1.226.649.400	1.194.710.000	97,40	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	15 Unit	100,00	1.226.649.400	1.194.710.000	97,40	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	847.771.120	776.788.560	91,63	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100,00	3.850.000	3.850.000	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100,00	843.921.120	772.938.560	91,59	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	77.892.000	69.873.056	89,70	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	7 Unit	100,00	9.500.000	5.567.056	58,60	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	100,00	68.392.000	64.306.000	94,03	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				17.500.311.482	17.217.086.792	98,69	
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	90%	90%	100,00	8.232.730.232	8.125.351.284	98,70	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	7.463.852.232	7.379.832.065	98,87	
Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	768.878.000	745.519.219	96,96	
Pelaksanaan Otonomi Daerah	90%	90%	100,00	6.483.048.437	6.365.924.932	98,19	
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	2.355.123.000	2.257.324.273	95,85	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp.) Pagu	(Rp.) Realisasi	(%) Capaian	
(1)		(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	2.978.303.437	2.961.448.943	99,43	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	1.149.622.000	1.147.151.716	99,79	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	100%	100,00	2.784.532.813	2.725.810.576	97,89	
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1.322.489.073	1.279.052.161	96,72	
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	616.956.000	615.890.178	99,83	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	2 Laporan	100,00	845.087.740	830.868.237	98,32	
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				98.302.063.322	76.766.396.296	78,09	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	84%	84%	100,00	3.117.328.622	2.630.371.958	84,38	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	191.034.000	19.368.000	10,14	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	22.814.000	4.968.000	21,78	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	102.116.000	14.400.000	14,10	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	20.132.000	0	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	100,00	45.972.000	0	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92%	100%	108,69	320.133.000	233.915.000	73,07	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	301.510.000	219.160.000	72,69	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	18.623.000	14.755.000	79,23	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50%	50,00	34.089.000	7.500.000	22,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang	100,00	34.089.000	7.500.000	22,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100,00	1.457.707.702	1.311.984.733	90,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	100,00	457.294.202	445.111.891	97,34	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	100,00	56.390.500	34.189.000	60,63	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	944.023.000	832.683.842	88,21	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100,00	987.977.920	953.456.512	96,51	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	20.000.000	10.812.000	54,06	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12.480.000	12.475.512	99,96	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17 Dokumen	17 Dokumen	100,00	955.497.920	930.169.000	97,35	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	100%	111,11	126.387.000	104.147.713	82,40	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	100,00	37.182.000	28.922.137	77,78	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp.) Pagu	(Rp.) Realisasi	(%) Capaian	
(1)		(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	100,00	89.205.000	75.225.576	84,33	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		90%	100%	111,11%	95.184.734.700	74.136.024.338	77,89	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		90%	100%	111,11	28.292.197.000	24.605.187.189	86,97	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	749.353.000	429.402.250	57,30	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00	11.724.756.800	11.368.505.052	96,96	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00	15.818.087.200	12.807.279.887	80,97	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		90%	100%	111,11	4.358.790.300	2.944.257.430	67,55	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00	2.284.984.300	1.488.839.069	65,16	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20 Dokumen	20 Dokumen	100,00	1.399.228.000	1.077.993.005	77,04	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang komunikasi, informatika, statistik, perpustakaan, arsip dan perhubungan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	674.578.000	377.425.356	55,95	
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		90%	100%	111,11	62.533.747.400	46.586.579.719	74,50	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	100 Unit	100 Unit	100,00	44.509.341.000	29.216.471.334	65,64	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	10 Lembaga	10 Lembaga	100,00	18.024.406.400	17.370.108.385	96,37	
BIRO HUKUM					7.046.874.193	6.781.802.674	95,81	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2.426.164.193	2.385.012.197	97,07	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	3.840.000	3.086.000	80,36	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	3.840.000	3.086.000	80,36	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	103.920.000	103.920.000	100,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	103.920.000	103.920.000	100,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12 Laporan	9 Laporan	75,00	7.680.000	5.760.000	75,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9 Laporan	75,00	7.680.000	5.760.000	75,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Orang	2 Orang	100,00	25.689.000	18.394.812	71,61	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp.) Pagu	(Rp.) Realisasi	(%) Capaian	
(1)		(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	2 Orang	100,00	25.689.000	18.394.812	71,61	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	1.465.213.913	1.434.184.105	97,88	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100,00	142.555.000	142.422.500	99,91	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300 Porsi	300 Porsi	100,00	10.529.280	9.912.000	94,14	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	40.123.737	37.227.000	92,78	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51 Laporan	51 Laporan	100,00	1.272.005.896	1.244.622.605	97,85	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	10 Unit	100,00	130.052.000	130.023.000	99,98	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	100,00	130.052.000	130.023.000	99,98	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	668.469.280	638.469.280	95,51	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Lembar	500 Lembar	100,00	5.000.000	5.000.000	100,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	663.469.280	633.469.280	95,48	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 Unit	30 Unit	100,00	21.300.000	21.175.000	99,41	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	30 Unit	100,00	21.300.000	21.175.000	99,41	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				4.620.710.000	4.396.790.477	95,15	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	100%	126%	126,00	2.744.350.000	2.659.356.691	96,90	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	90 Dokumen	68 Dokumen	75,55	984.350.000	926.261.162	94,10	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	650 Dokumen	901 Dokumen	138,61	300.000.000	296.575.819	98,86	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	740 Dokumen	968 Dokumen	130,81	600.000.000	594.652.084	99,11	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	350 Dokumen	369 Dokumen	105,43	860.000.000	841.867.626	97,89	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	1.876.360.000	1.737.433.786	92,60	
	Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	10 Perkara	12 Perkara	120,00	1.316.360.000	1.179.454.933	89,60	
	Penanganan Non Litigasi, Pelaporan RANHAM, Penilaian Kab/Kota Peduli HAM	5 Kasus	12 Kasus	240,00	560.000.000	557.978.853	99,64	
	BIRO PEREKONOMIAN				18.765.401.038	13.708.281.232	73,05	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	84%	87%	103,57	2.138.811.138	2.015.797.064	94,25	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	6 Dokumen	75,00	45.183.200	36.411.340	80,59	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	34.323.200	31.920.190	93,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	10.860.000	4.491.150	41,35	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp.) Pagu	(Rp.) Realisasi	(%) Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	112.614.000	106.446.100	94,52	
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	112.614.000	106.446.100	94,52	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	13.440.000	11.400.000	84,82	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00	13.440.000	11.400.000	84,82	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	40%	40,00	33.867.500	13.081.800	38,63	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	23 Dokumen	92,00	1.200.000	960.000	80,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	1 Orang	33,33	32.667.500	12.121.800	37,11	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	982.944.458	950.957.643	96,75	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket	50 Paket	100,00	50.000.000	49.787.000	99,57	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Paket	23 Paket	92,00	30.000.000	22.022.000	73,41	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	100,00	18.016.000	17.256.100	95,78	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96 Eksemplar	96 Eksemplar	100,00	7.756.800	7.680.000	99,01	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	125 Laporan	100,00	877.171.658	854.212.543	97,38	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00	50.356.500	39.086.200	77,62	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	100,00	50.356.500	39.086.200	77,62	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	843.852.480	815.281.920	96,61	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100,00	4.200.000	4.200.000	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	91,67	839.652.480	811.081.920	96,60	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98%	98,00	56.553.000	43.132.061	76,27	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	100,00	38.303.000	25.143.061	65,64	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	24 Unit	96,00	18.250.000	17.989.000	98,57	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100%	100%	100,00	16.626.589.900	11.692.484.168	70,32	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	1.511.140.000	1.393.293.067	92,20	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	809.140.000	774.498.111	95,72	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	702.000.000	618.794.956	88,15	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00	11.842.400.400	7.205.830.011	60,85	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	10.964.400.000	6.465.354.142	58,97	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp.) Pagu	(Rp.) Realisasi	(%) Capaian	
(1)		(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	415.000.000	353.874.167	85,27	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	463.000.400	386.601.702	84,64	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3.273.049.500	3.093.361.090	94,51	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	2.222.049.800	2.082.151.513	93,70	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	444.000.000	418.726.971	94,31	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	606.999.700	592.482.606	97,61	
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA					<u>10.904.170.960</u>	<u>9.900.945.618</u>	<u>90,80</u>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		83%	83%	10,00	3.458.419.060	3.161.842.680	91,42	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	134.278.000	133.320.000	99,29	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	134.278.000	133.320.000	99,29	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	222.220.000	197.851.608	89,03	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100,00	71.040.000	66.159.700	93,13	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	20 Orang	100,00	85.780.000	68.244.848	79,56	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	11 Orang	11 Orang	100,00	65.400.000	63.447.060	97,01	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	888.702.820	832.570.528	93,68	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	100,00	141.054.320	140.638.000	99,70	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100,00	57.446.500	30.697.000	53,44	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	100,00	690.202.000	661.235.528	95,80	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100,00	599.278.605	571.518.329	95,37	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126 Unit	126 Unit	100,00	599.278.605	571.518.329	95,37	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100,00	1.553.241.635	1.370.037.715	88,21	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	100,00	5.222.400	5.121.000	98,06	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100,00	82.470.700	76.100.355	92,28	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100,00	1.465.548.535	1.288.816.360	87,94	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	100%	100,00	60.698.000	56.544.500	93,16	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100,00	13.499.000	11.434.500	84,71	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp.) Pagu	(Rp.) Realisasi	(%) Capaian	
(1)		(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	100,00	13.499.000	11.460.000	84,90	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	22 Unit	100,00	33.700.000	33.650.000	99,85	
PROGRAM KEBIJAKAN & PELAYANAN PENGADAAN BARANG & JASA		100%	100%	100,00	7.445.751.900	6.739.102.938	90,51	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%	100%	100,00	2.257.812.000	2.173.739.623	96,28	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	100,00	417.852.000	367.859.131	88,03	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	2 Laporan	100,00	861.420.000	848.132.100	98,46	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	2 Laporan	100,00	978.540.000	957.748.392	97,87	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		100%	100%	100,00	2.633.982.900	2.274.216.236	86,34	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	2 Laporan	2 Laporan	100,00	1.184.267.900	938.744.415	79,27	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	2 Laporan	100,00	755.300.000	713.656.891	94,49	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	100,00	694.415.000	621.814.930	89,55	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100%	100%	100,00	2.553.957.000	2.291.147.079	89,71	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	200 Orang	100,00	894.522.000	826.546.802	92,40	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	971.875.000	925.542.940	95,23	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	687.560.000	539.057.337	78,40	
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					14.468.515.244	13.912.068.479	96,15	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					5.230.318.094	5.015.079.323	95,88	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	257.160.000	235.039.600	91,40	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	257.160.000	235.039.600	91,40	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	544.270.100	487.128.992	89,50	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 Paket	53 Paket	100,00	89.739.600	84.502.500	94,16	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Orang	25 Orang	100,00	367.530.500	322.178.837	87,66	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	100,00	87.000.000	80.447.655	92,47	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	2.086.615.194	2.039.369.956	97,74	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket	100,00	130.588.400	118.338.144	90,62	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	100,00	1.956.026.794	1.921.031.812	98,21	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		85%	100%	117,65	395.886.200	383.282.460	96,82	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp.) Pagu	(Rp.) Realisasi	(%) Capaian	
(1)		(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	17 Unit	100,00	395.886.200	383.282.460	96,82	
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85%	100%	117,65	1.725.644.600	1.701.631.022	98,61	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100,00	2.780.000	0	0,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100,00	208.359.800	187.126.222	89,91	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100,00	1.514.504.800	1.514.504.800	100,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85%	100%	117,65	220.742.000	168.627.293	76,39	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100,00	36.874.000	6.027.719	16,35	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	100,00	152.018.000	130.775.074	86,03	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit	45 Unit	100,00	31.850.000	31.824.500	99,92	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		80%	90%	112,50	9.238.197.150	8.896.989.156	96,31	
		100%	100%	100,00				
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		80%	83,33%	104,16	6.123.051.200	5.922.575.335	96,72	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	6 Laporan	100,00	4.400.171.600	4.324.505.228	98,28	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	6 Laporan	50,00	1.117.246.000	1.001.763.272	89,66	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	12 Laporan	100,00	605.633.600	596.306.835	98,46	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		80%	100%	125,00	3.115.145.950	2.974.413.821	95,48	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	719.592.600	710.992.900	98,80	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1.551.811.750	1.489.020.921	95,95	
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	843.741.600	774.400.000	91,78	
BIRO ORGANISASI					8.525.460.594	7.334.467.760	86,03	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		84%	89,88%		1.995.546.594	1.711.525.679	85,77	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	100,00	115.440.200	96.017.500	83,18	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	115.440.200	96.017.500	83,18	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	10.230.000	9.240.000	90,32	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00	10.230.000	9.240.000	90,32	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7 Orang	1 Orang	14,28	176.397.500	65.940.450	37,38	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	100,00	60.217.500	60.217.000	99,99	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp.) Pagu	(Rp.) Realisasi	(%) Capaian	
(1)		(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9 Orang	1 Orang	11,11	116.180.000	5.687.450	4,90	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	938.822.000	834.388.161	88,88	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	100,00	36.675.000	22.919.000	62,49	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	1 Paket	50,00	105.532.000	68.948.000	65,33	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	1 Paket	50,00	16.500.000	5.500.000	33,33	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100,00	18.300.000	8.552.700	46,74	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00	694.050.000	664.668.461	95,77	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	67.765.000	63.800.000	94,15	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00	229.532.500	210.957.500	91,91	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	15 Unit	100,00	229.532.500	210.957.500	91,91	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	447.030.394	446.107.200	99,79	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	0	923.194	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100,00	446.107.200	446.107.200	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50%	50,00	78.094.000	48.910.868	62,63	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	13 Unit	72,22	59.312.000	43.693.868	73,67	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Unit	6 Unit	28,57	18.782.000	5.217.000	27,78	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		81%	97,3%	120,12	6.529.914.000	5.622.942.081	86,11	
		97%	100%	103,09				
		89%	100%	112,36				
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		100%	100%	100,00	2.653.778.000	2.320.567.571	87,44	
		96%	100%	104,17				
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	877.513.500	696.213.491	79,34	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	726.408.500	653.306.305	89,94	
	Penataan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1.049.856.000	971.047.775	92,49	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100,00	3.876.136.000	3.302.374.510	85,20	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1.492.148.000	1.269.485.307	85,08	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1.094.466.500	855.055.156	78,13	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	1 Laporan	100,00	179.825.000	168.550.300	93,73	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	502.036.500	469.308.750	93,48	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp.) Pagu	(Rp.) Realisasi	(%) Capaian	
(1)		(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	607.660.000	539.974.997	88,86	
BIRO UMUM					277.191.949.281	254.154.761.302	91,68	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					277.191.949.281	254.154.761.302	91,68	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	79.346.509.537	70.663.228.016	89,04	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	373 Orang/Bulan	373 Orang/Bulan	100,00	77.828.082.037	69.279.044.370	89,01	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	1.518.427.500	1.384.183.646	90,41	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	1.165.320.000	1.120.852.348	96,18	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00	522.000.000	520.547.700	99,72	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00	643.320.000	600.304.648	93,31	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	3.659.174.800	3.378.846.161	92,34	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	100,00	782.950.000	744.363.000	95,07	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	1.988.568.000	1.869.692.506	94,02	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125 Orang/Bulan	125 Orang/Bulan	100,00	887.656.800	764.790.655	86,16	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	33.545.371.520	32.019.994.577	95,45	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	6 Paket	100,00	283.109.400	265.399.690	93,74	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	6 Paket	100,00	497.466.100	389.224.680	78,24	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225 Paket	225 Paket	100,00	7.950.610.000	7.909.626.405	99,48	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14 Paket	14 Paket	100,00	733.290.000	670.910.800	91,49	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1920 Org/Perjln	1920 Org/Perjln	100,00	23.608.302.720	22.363.179.429	94,73	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	210.828.800	198.243.000	94,03	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	261.764.500	223.410.573	85,35	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100,00	66.729.015.329	61.744.098.526	92,53	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111 Unit	111 Unit	100,00	56.877.501.200	52.993.254.476	93,17	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150 Unit	150 Unit	100,00	9.851.514.129	8.750.844.050	88,83	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100,00	29.160.936.480	27.599.923.938	94,65	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100,00	83.700.000	50.127.000	59,89	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100,00	10.624.006.700	10.299.342.479	96,94	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100,00	2.659.168.400	2.109.669.679	79,34	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp.) Pagu	(Rp.) Realisasi	(%) Capaian	
(1)		(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100,00	15.794.061.380	15.140.784.780	95,86	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100,00	26.109.832.256	22.612.020.058	86,60	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80 Unit	80 Unit	100,00	10.455.666.000	9.405.721.025	89,96	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	447 Unit	447 Unit	100,00	2.367.234.000	1.298.665.150	54,86	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13 Unit	13 Unit	100,00	13.054.682.256	11.766.414.133	90,13	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	325 Unit	325 Unit	100,00	232.250.000	141.219.750	60,81	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	100%	100,00	15.202.636.431	14.413.169.879	94,81	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100,00	250.252.232	172.914.079	69,10	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Paket	8 Paket	100,00	213.476.000	213.236.000	99,89	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	8 Orang	100,00	870.000.000	158.111.800	18,17	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100,00	13.868.908.199	13.868.908.000	99,99	
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100%	100%	100,00	22.272.152.928	20.601.627.799	92,50	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	17 Paket	17 Paket	100,00	8.321.946.048	7.799.770.398	93,73	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	17 Paket	17 Paket	100,00	5.939.584.000	5.370.366.088	90,42	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	28 Paket	28 Paket	100,00	8.010.622.880	7.431.491.313	92,77	
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN					<u>34.351.189.913</u>	<u>33.916.810.261</u>	<u>98,74</u>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		85%	86,3%	101,53	34.351.189.913	33.916.810.261	98,74	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		90%	90%	100,00	964.150.000	929.645.895	96,42	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	767.000.000	733.343.672	95,61	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100,00	197.150.000	196.302.223	99,57	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	455.500.000	453.955.112	99,66	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	455.500.000	453.955.112	99,66	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	823.847.500	807.168.748	97,98	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	567.369.000	554.706.961	97,77	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	20 Orang	100,00	256.478.500	252.461.787	98,43	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100,00	2.164.884.933	2.114.520.990	97,67	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja			Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	(%) Capaian	(Rp.) Pagu	(Rp.) Realisasi	(%) Capaian	
(1)		(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150 Paket	150 Paket	100,00	245.304.220	219.045.323	89,30	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50 Paket	50 Paket	100,00	72.072.000	50.040.000	69,43	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 Paket	15 Paket	100,00	10.477.818	9.600.000	91,62	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	100,00	1837030895	1.835.835.667	99,93	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	101.433.000	74.244.386	73,20	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit	100,00	92.401.000	66.719.386	72,21	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	100,00	9.032.000	7.525.000	83,31	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00	2.043.471.280	2.022.419.850	98,97	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100,00	25.642.800	10.892.650	42,48	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100,00	2.017.828.480	2.011.527.200	99,69	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100,00	845.087.000	844.358.685	99,91	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	50 Unit	250%	845.087.000	844.358.685	99,91	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	100,00	24.342.432.000	24.062.042.201	98,85	
	Penyiapan Materi Pimpinan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	659.464.000	659.348.945	99,98	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6 Laporan	6 Laporan	100,00	13.142.836.200	13.141.419.165	99,99	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	10.540.132.000	10.261.274.091	97,35	
	Fasilitasi Keprotokolan	100%	100%	100,00	2.610.384.000	2.608.454.394	99,93	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	12 Laporan	100,00	1.395.792.000	1.394.897.406	99,94	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100,00	635.592.000	635.085.690	99,92	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	579.000.000	578.471.298	99,91	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang menyajikan gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran instansi sebagai penjabaran capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kelima (terakhir) pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Dengan memperhatikan uraian dan data-data pada BAB III, maka dapat disampaikan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir seluruh target sasaran yang ditetapkan telah dicapai sesuai harapan.

Dari 4 (empat) sasaran yang terbagi kedalam 12 (dua belas) indikator kinerja, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang mempunyai capaian melebihi 100% dan 1 (satu) indikator kinerja diatas 85% yang belum mencapai 100%. Indikator kinerja tersebut adalah “Indeks Tata Kelola Pengadaan” dengan capaian persentase capaian sebesar 88,19%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Pemenuhan bukti dukung yang dikirim ke LKPP tidak bisa diketahui hasilnya dalam waktu singkat, karena harus menunggu proses verifikasi dan validasi oleh tim LKPP;
- Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia pengelola pengadaan barang jasa yang mengakibatkan jumlah paket dan jumlah SDM tidak sebanding;
- Sangat dibutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia pada Bagian Pengelolaan LPSE, terutama yang memiliki kemampuan dasar bidang IT/Informatika yang saat ini sangat diprioritaskan karena jumlah PNS yang dibawah oleh Bagian Pengelolaan LPSE hanya berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari (3 PNS JF Penyetaraan dan 1 PNS JF Pranata Komputer Mahir serta 2 PNS Pelaksana Administrasi LPSE);
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya harus memperhatikan TKDN dan produk dalam negeri, sehingga barang yang dibutuhkan belum banyak tersedia di pasaran.

Akan dilakukan Upaya guna memperbaiki kinerja tersebut dengan melakukan kembali sosialisasi aturan yang berlaku, asistensi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2023. Dengan tersusunnya LKjIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan/evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Setda Prov. Kaltim di tahun mendatang.

LAMPIRAN



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100 /K. 122 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 17 Februari 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100/K. 122/ 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pembina : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. Unsur Kementerian Dalam Negeri
- Ketua : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Unsur Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
7. Unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Unsur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

10. Unsur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

11. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111

Home Page : <http://kaltimprov.go.id>

SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000.9.6.3/ 1162

/B. Adpim-I

TENTANG

**TIM ASISTENSI / COACHING CLINIC LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan asistensi / *coaching clinic* agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Tim asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
- c. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim Asistensi / *coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, melaksanakan :
Melakukan fasilitasi, koordinasi, pendampingan dan arahan-arahan serta konsultasi dalam rangka kegiatan asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 31 Januari 2023



Sekretaris Daerah,
Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Pembina Utama Madya
NIP 197012291990032003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR: 000.9-6-3/ 462 /B.Adpim-I TENTANG TIM
ASISTENSI / COACHING CLINIC LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM ASISTENSI / COACHING CLINIC
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN
2023

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur.
- Anggota :
1. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Unsur Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
 3. Unsur Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.
 4. Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur.
 5. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur.
 6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
 7. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur.
 8. Unsur Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur
 9. Unsur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Timur.
 10. Unsur Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
 11. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda
Provinsi Kalimantan Timur

Anggota :

1. M. Aditya Rahman, S.ST, M.Si. (Analisis Perencanaan).
2. Eduardo Heyko, M.Si. (Analisis Perencanaan dan Pelaporan).
3. Rahmatullah Surya Nugraha, S.Tr.IP. (Analisis Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan).
4. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan).
5. Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat. (Pengelola Data Perencanaan).
6. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Sekretaris Daerah,



Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Pembina Utama Madya
NIP 197012291990032003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111

Home Page : <http://kaltimprov.go.id>

SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000.9.6.3/ 1434 /B. Adpim-I

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk panitia kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023;
- c. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam panitia kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dengan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

- : Membentuk Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, melaksanakan :
Melakukan fasilitasi, koordinasi, pendampingan dan arahan-arahan serta konsultasi dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Samarinda

Pada tanggal : 20 Maret 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,


Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19710808 199103 2 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 000.9.6.3/ **1434** /B.Adpim-I TENTANG PANITIA
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONIL PANITIA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN
2023

Narasumber 1
Narasumber 2
Moderator
Pembawa Acara
Rohaniwan

Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda
Prov. Kaltim.
2. M. Aditya Rahman, S.ST, M.Si. (Analisis Perencanaan).
3. Eduardo Heyko, M.Si. (Analisis Perencanaan dan
Pelaporan).
4. Reynaldi Akhmad, S.STP (Analisis Pelayanan)
5. Rahmatullah Surya Nugraha, S.Tr.IP. (Analisis Evaluasi
Perencanaan dan Pelaporan).
6. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan).
7. Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat. (Pengelola Data
Perencanaan).
9. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim.

Ditetapkan : Samarinda

Pada tanggal : **20** Maret 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,


Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19710808 199103 2 007



NOTA DINAS

Kepada Yth. : Seluruh Kepala Biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim
Dari : Asisten Administrasi Umum Sekda Prov. Kaltim
Tanggal : 05 Februari 2024
Nomor : 000.1.5/0153/B.Adpim-I
Hal : Undangan

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, maka dengan ini kami mengundang Saudara/i pada:

Hari : Senin
Tanggal : 12 Februari 2024
Waktu : (Jadwal terlampir)
Tempat : Hotel Astara Balikpapan
 Jl. Jenderal Sudirman No.47, Balikpapan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon untuk dapat menugaskan Kabag, Kasubbag dan Staf (operator) yang membidangi tugas tersebut dengan membawa kelengkapan dokumen dan data penunjang yang diperlukan serta membawa laptop.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



Ir. Riza Indra Riadi, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641028 199003 1 009

JADWAL KEGIATAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
dan
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2025

Balikpapan, 12 Februari 2024

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
Senin, 12 Februari 2024	08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
	08.30 - 09.00	Pembukaan:	
		1. Mendengarkan Lagu Indonesia Raya	Panitia
		2. Pembacaan Doa	Panitia
		3. Laporan Ketua Panitia	Karo Adpim
		4. Sambutan Sekaligus Pembukaan Acara	Asisten Administrasi Umum
	09.00 - 10.00	Materi/Arahan Evaluasi LKjIP oleh Evaluator	Narsum/Inspektorat Provinsi Kaltim
	10.00 - 10.15	Coffee Break	Panitia
	10.15 - 12.00	Pendampingan/Asistensi dan melengkapi laporan yang belum selesai	Biro Adpim
	12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia
	13.00 - 15.00	Pengisian tabel-tabel pada RENJA 2025	Biro Adpim
	15.00 - 15.15	Coffee Break	Panitia
	15.15 - 16.00	Pengisian tabel-tabel pada RENJA 2025	Biro Adpim
	16.00 - 16.15	Penutupan	Panitia

NOTULEN

**Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
dan
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025**

Hari : Senin
Tanggal : 12 Februari 2024
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Astara Hotel Balikpapan
Peserta : (Absen terlampir)

Pembukaan

- Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim, Ibu Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos., M.Si.
- Sambutan sekaligus membuka acara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 oleh Asisten Administrasi Umum Setda Prov.Kaltim, Bapak Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si.

Materi

- Ibu Dewi Supriati, SE, M.Si (Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Hasil Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 67,93 (B) menjadi 73,90 (BB).
 - 5 hal yang baru dalam penilaian Evaluasi SAKIP, yaitu :
 1. Penambahan dan pengurangan penilaian pada komponen pengukuran kinerja, laporan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 2. Memotret cascading dan crosscutting
 3. Memotret sistem reward dan punishment
 4. Memotret dampak implementasi SAKIP terhadap efektivitas dan efesiensi kinerja.
 5. Type baru dalam penilaian.
- Hal ini sudah dilaksanakan, tetapi mungkin nanti ada perubahan kedepannya, tahun ini masih menggunakan template dari Pergub Nomor 26 Tahun 2022 dan ada beberapa masukan modifikasi dari permenpan tetapi tujuannya tidak menyimpang dari permenpan tersebut, tujuannya disesuaikan dengan kemampuan daerah, apabila mengikuti sama persis dengan permenpan, maka nilai SAKIP akan berat, akan tetapi kedepannya akan berusaha untuk benar-benar merujuk ke permenpan.
- Target RPD di tahun 2026 nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh predikat A (memuaskan). Seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, untuk Indikator Kinerja harus memasukkan nilai SAKIP nya. Kemudian berdasarkan Permenpan, jika target nilai A, maka 3 Perangkat Daerah nilainya harus A, dan Menpan akan melakukan evaluasi ke Provinsi dan melakukan *sampling* ke semua Perangkat Daerah, karena tahun Provinsi Kalimantan Timur nilainya masih BB, maka tidak semua Perangkat Daerah dilakukan *sampling*, dan

biasanya yang dievaluasi adalah sasaran dari Renstra atau RPJMD. Tugas Berat bagi Inspektorat Daerah yaitu harus mendampingi satu Perangkat Daerah yang nilainya masih C. Sekretariat Daerah termasuk ke dalam klaster tambahan yang nilainya naik dari B ke BB yang tahun lalu peringkat 22, tahun ini peringkat 11.

- Perbandingan bobot nilai Permenpan 88/2021 dan Pergub 26/2022, dilakukan modifikasi dengan mengurangi bobot nilai di Pergub dengan tidak menyimpang dari Permenpan, karena menyesuaikan dengan perangkat daerah. Di Permenpan Capaian Kinerja tidak dinilai, karena sudah tercantum di Perencanaan Kinerja, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi. Inspektorat Daerah sebagai *Leading Sector* evaluasi SAKIP, dengan tidak menyimpang dari Permenpan, hanya saja mengurangi bobot nilai dengan menambah Capaian Kinerja Sasaran dan Capaian Kinerja lainnya. Ada beberapa masukan dari Perangkat Daerah terkait Penilaian Capaian Kinerja bisa diukur dari penghargaan yang diterima Perangkat Daerah, maka dari itu tahun ini akan dilakukan revisi terhadap lampiran Pergub, dengan mengurangi bobot capaian kinerja sasaran dan ring-ring nilai A, B, C, D akan direvisi juga, dan Pergubnya setelah revisi akan efektif digunakan pada evaluasi tahun 2025 terhadap SAKIP tahun 2024.
- Permasalahan yang ditemukan pada saat evaluasi dan perlu diperbaiki, yaitu :
 1. Perencanaan Kinerja, Target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja, baik itu Renstra, Renja, dan PK belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Permenpan, contohnya menantang, dan realistis dan tidak disertai data atau bukti dukung/analisis alasan penetapan target kinerja serta belum dapat ditelusuri dengan mudah datanya. sehingga program/kegiatan yang dilakukan belum sepuh memiliki arah yang jelas dalam rangka mencapai target yang diinginkan Target dalam Perencanaan Kinerja.
 2. Pengukuran Kinerja :
 - a. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment, dokumen yang dikumpulkan hanya mengenai sikap dan perilaku, untuk dokumen mengenai kinerja belum ada;
 - b. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
 - c. Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar pengusulan penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
 3. Pelaporan Kinerja :
 - a. Dokumen Laporan Kinerja hanya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja 1 (satu) tahun sebelumnya, minimal perbandingannya dengan 3 (tiga) tahun sebelumnya;
 - b. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas kinerja belum dapat dibandingkan karena dalam lakip hanya memuat satu tahun anggaran, sehingga agar diperbaiki untuk tahun berikutnya agar dicantumkan minimal 1 (satu) tahun sebelumnya atau sebaiknya 3 (tiga) tahun sebelumnya, agar bisa dibandingkan Tingkat efisiensi dan efektifitasnya.
 5. Capaian Kinerja :
 - a. Capaian kinerja belum didukung dengan data yang handal;
 - b. Nilai akuntabilitas kinerja dalam dokumen perencanaan ada namun tidak dilaporkan dalam LAKIP.

- Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian agar mendapat nilai A :
 1. Masih terdapat IK yang tidak selaras sehingga kondisi Indikator kinerja menjadi kurang smart;
 2. Kualitas dokumen perencanaan belum memadai sehingga meskipun implementasi sudah memadai akan terkendala kerangka logis;
 3. Pengukuran kinerja telah dilakukan per TW dengan melaporkan capaian kinerja namun tidak disertai data dukung capaian kinerja;
 4. Dalam keputusan Sekda tentang Penetapan Employee of The Month yang menjadi kriteria dalam persyaratan umum, perilaku BerAkhlak, Perilaku kode etik PNS, Ide/gagasan/kreatif/inovasi, Pengembangan Potensi Diri, dan berbagi pengalaman, belum secara spesifik terkait dengan pengukuran kinerja;
 5. Masih terdapat beberapa komponen/sub komponen yang tidak disertai bukti dukung;
 6. Dalam melakukan pengukuran kinerja secara berkala melalui SIAKIP telah mencantumkan faktor pendorong dan penghambat, namun upaya belum dilakukan pengimputan sehingga belum dapat diyakini apakah dijadikan dasar untuk penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktifitas/kegiatan serta penyesuaian anggaran;
 7. Data dukung berdasarkan pengimputan realisasi kinerja pada SIAKIP yang disertai dengan faktor pendorong dan faktor penghambat, namun belum sampai dengan level pelaksana;
 8. Dalam lakip telah menginfokan analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya, namun belum membandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga belum dapat menyimpulkan apakah lebih efisien dibanding tahun sebelumnya atau tidak.

Diskusi Tanya Jawab:

(Kepala Biro Adpim Setda Prov. Kaltim)

Pertanyaan:

- Terkait reward dan punishment, berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021, disitu ada teguran secara lisan maupun tertulis, itukan punishment, terkadang kami bingung bentuk punishment ini seperti apa? karena ada yang tidak disiplin, kami sudah memberikan teguran lisan dan tertulis
- Untuk reward terkait *Employee of The Month*, masih ada yang kurang terkait kinerja, tapi yang saya lihat etika, inovasi sudah termasuk kedalam kinerjanya, minta penjelasan lagi terkait kinerja tersebut?

Tanggapan Narasumber:

- Jadi kalau punishment didalam PP 94 itu kan lebih ke disiplin PNS, larangan PNS, kewajiban PNS, pelanggarannya apa, hukumannya berat, sedang, ringan, tetapi disini Memotret sistem reward dan punishment terkait dengan pengukuran kinerja, misalnya di perjanjian kinerja kita memiliki target kinerja, Ketika target kinerja 80, akan tetapi tercapainya 100, berarti kita seharusnya diberikan reward, dan reward pun tidak harus berbentuk uang, bisa saja dalam bentuk ucapan terima kasih dari pimpinan kepada pengampu kegiatan tersebut atas capaian kinerjanya yang telah melampaui target dan lebih efisien dari tahun lalu, itu sudah merupakan reward.
- Punishment bisa seperti capaian kinerja yang anda capai pada tahun ini tidak sesuai target kinerja, misalnya target 100 hanya tercapai 40, 70 atau 80. Jadi silahkan dibuat kebijakan masing-masing, mungkin apabila capaiannya hanya 10%, 20% bisa diberikan teguran tertulis, tapi apabila tercapai 70 atau 80% bisa diumumkan pada saat rapat, tapi dibuatkan notulen ditegur pada saat rapat.

- Terkait penghargaan yang perilaku berbasis kode etik PNS, pengembangan potensi ini sudah termasuk kinerja yang baik, tetapi disitu kami tidak melihat pengukuran kinerja, capaian kinerja berdasarkan Sakip, mungkin dia sudah berakhlak berdasarkan Permenpan, perilaku berbasis kode etik PNS berdasarkan Pergub kode etik, melaksanakan kewajiban tidak melanggar aturan, mempunyai ide untuk pengembangan potensi diri, akan tetapi disini kami menilainya bukan itu, tetapi berdasarkan pengukuran kinerja atau penetapan target yang dia janjikan di awal tahun bisa tercapai, bisa dilihat seperti di SKP dan Perjanjian Kinerja untuk penilaian kami di SAKIP.

(Biro PBJ Setda Prov. Kaltim)

Permasalahan:

- Terkait Komponen Penilaian yang ditampilkan dari tahun 2017 sampai 2023, berdasarkan data yang saya miliki yang dishare oleh Biro Adpim dan sumbernya juga dari Inspektorat, pada tahun 2022 nilainya 73,90, akan tetapi yang ditampilkan disini tahun 2023 nilainya 73,90 atau BB, yang mana yang betul?
- Terkait dengan Komponen Penilaian Permenpan 88 dengan Pergub 26, apakah untuk tahun 2023 kita menggunakan penilaian berdasarkan permenpan 88 atau pergub 26? Karena kaitannya adalah persentase penilaiannya kan beda walaupun total poinnya 100, tetapi ada poin yang tidak dinilai seperti capaian kinerja apabila berdasarkan Permenpan, apabila berdasarkan Pergub Capaian Kinerja itu dinilai.
- Terkait revisi pergub SOTK, kami dari PBJ diminta melakukan revisi, di Biro PBJ tidak ada Kasubbag TU, sempat disarankan untuk melakukan usulan perubahan SOTK tersebut, kami sudah bersurat, penilaian kan nanti bulan mei, kalau misalnya kami bersurat dan proses untuk menjadi Kasubbag TU belum selesai, apakah terkait penilaian atau evaluasi sudah masuk dalam ranah penilaian? Walaupun implementasi pelantikan Kasubbag TU nya masih belum tau kapan.
- Terkait dengan reward dan punishment, bukti dukung yang harus disiapkan untuk reward misalnya capaian kinerja sudah sesuai target, kan ada E-Sakip dan E-Kinerja yang isinya SKP yang bisa disampaikan, apakah data dukung hanya dilampirkan print out dari SKP saja? Apakah bentuk ucapan terima kasih bisa disampaikan sebagai bukti dukung? Sedangkan punishment berupa surat teguran apakah disampaikan untuk bukti dukung?

Tanggapan Narasumber:

- Untuk data Penilaian dari Biro Organisasi yang tahun 2022 sudah 73,90, itu sebenarnya sama saja, karena tahun 2023 itu adalah nilai terhadap Sakip tahun 2022.
- Untuk sementara silahkan memakani Pergub 26, yang penting komponen didalam Permenpan tidak dihilangkan, tapi kalau disesuaikan dengan kondisi daerah silahkan, di Pergub ditambahkan capaian kinerja, sehingga bobotnya kami kurangi, karena selama ini capaian kinerja di daerah tinggi-tinggi, kemudian kami buatlah 20, untuk pengukuran, pelaporan kami sudah bagus, makanya bobotnya kami turunkan. Arahan Sekda untuk Pergub tidak terlalu jauh dengan Permenpan bobot nilainya, sehingga tahun ini kami akan melakukan revisi seperti pada capaian kinerja lainnya itu awalnya penghargaan, akan kami ubah menjadi hasil radalok atau capaian fisik, kemudian bobotnya akan kami sesuaikan Kembali, berlakunya mulai tahun depan.
- Untuk revisi SOTK tadi, itu bisa dilakukan penilaian, karena evaluasi Sakip itu tidak hanya menilai capaian tahun ini, tapi lebih ke Sakipnya, sistemnya. Ketika akan mengusulkan Kasubbag TU, kami mohon analisisnya di depan apa alasan untuk mengusulkan Kasubbag TU, berarti ada kinerja-kinerja yang selama ini yang harusnya dilaksanakan Kasubbag TU akan tetapi dilaksanakan dibidang lain, berarti

itu salah satu contoh pengukuran kinerja digunakan untuk penyesuaian atau *refocusing* organisasi, itu bisa kami lakukan penilaian tahun ini meskipun masih proses.

- Terkait reward dan punishment, yang pertama dibuat adalah kebijakannya, Biro mana yang membuat kebijakan, kemudian bentuk reward dan punishmentnya itu apa, nanti dituangkan kedalam kebijakan tersebut, dan di kebijakan tersebut dijelaskan apa saja kriteria pemberian reward.

Penyusunan LKjIP Tahun 2023

Biro Adpim sebagai Penanggung Jawab

- Kegiatan penyusunan LKjIP dalam hal ini adalah melengkapi beberapa data yang masih kurang dari Biro-biro, dimulai pada BAB II, masing-masing biro diminta untuk melengkapi data pada tabel 2.5 yaitu Target Belanja Setda Prov.Kaltim Tahun 2023 :
 - a. Anggaran, Realisasi, dan sisa Anggaran Belanja Operasi;
 - b. Anggaran, Realisasi, dan sisa Anggaran Belanja Modal.
- Kemudian Biro-biro diminta untuk mengisi data pada tabel 2.6 yaitu Anggaran per Sasaran Tahun 2023 yang terdiri dari Pagu Anggaran, Realisasi, dan Capaian Program.
- Selanjutnya masuk ke BAB III, Biro-biro diminta untuk melengkapi data pada tabel 3.3 yaitu pengukuran Kinerja Tahun 2023, yang isinya anatar lain :
 - a. Target dan Realisasi Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 - b. Target dan Realisasi persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti;
 - c. Persentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti;
 - d. Realisasi dan capaian persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi;
 - e. Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti;
 - f. Persentase capaian pelaksanaan Pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama;
 - g. Indeks tata Kelola pengadaan;
 - h. Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B);
 - i. Indeks Kelembagaan;
 - j. Persentase indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah yang nilainya >80 (B);
 - k. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
 - l. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pimpinan.
- Selanjutnya ke bagian Analisis Capaian Kinerja per Sasaran (BAB III), selain Biro Organisasi dan Biro Ekonomi (Sudah lengkap), masing-masing biro diminta untuk menambahkan bukti dukung, seperti skor EKPPD, persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti, Persentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti, persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi, pelaksanaan Pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama, Indeks tata Kelola pengadaan, Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pimpinan.
- Untuk tabel 3.16 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 perlu ditambahkan narasi analisis dan perbandingan dengan tahun sebelumnya.
- Pada BAB III, Biro-biro juga diminta untuk mengisi tabel 3.17 Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2023, tabel 3.18 Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan tabel 3.19 Realisasi Kinerja dan Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023.

Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

- Pembahasan singkat mengenai isu strategis, analisis keberhasilan/kegagalan, serta evaluasi terhadap tabel :
 - a. TC.29 (Indikator);
 - b. TC.30 (IKD disesuaikan dengan tabel 7.2 Renstra 2024-2026 dan analisis);
 - c. TC.31 (Jika ada analisis kabutuhan anggaran pada tabel sisi kanan);
 - d. TC.32 (Jika ada penambahan kegiatan maupun sub kegiatan/usulan baru);
 - e. TC.33 (sesuai Renstra).



DAFTAR HADIR : Penyusunan LKJIP Setda Prov. Kaltim 2023 dan Penyusunan Ranwal RENJA Setda Prov. Kaltim 2025

HARI/TANGGAL : Senin, 12 Februari 2024

PUKUL : 08.30 WITA - selesai

TEMPAT : Astara Hotel Balikpapan

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Ir. Piza Indra Riadi, M.Si	Setda Prov. Kaltim	Asisten III	1	
2	Syanipah Alauwiyah, S.Sos. Msi	Biro Adpim	KARO Adpim		2
3	Inni Indarperi, S.Hut. Msi	---	Kabag PK.	3	
4	Sugjid Awoluddin	Biro PBJ	Kabag.		4
5	Denny W	---	Arcam	5	
6	Hana Iriana, SE, MM	B. Umum	Kabag. TU		6
7	Umi Wahyuni. A	B. POD	Kasubag TU	7	
8	Aryas HW	B. POD	Staf		8
9	Sudarsono	KARO PBJ	Staf	9	
10	Fahreza Hamay	Biro PBJ	Staf		10
11	AGUS A.T.	Biro Hukum	TU	11	
12	Anoik.	---	Staf TU		12
13	Maya Fitria	B. Kesra	Kasubag TU	13	
14	Joko Satia Bndi	B. Umum	Kasubag TU		14
15	Apif Raja	---	Staf	15	
16	Wahyu Dwi A	---	Staf		16
17	Denri S	---	Staf	17	
18	Atif Mukti Pun	B. Org	Staf		18
19	Aditya Brahman	B. Org	Staf	19	
20	Atipah 2.	B. Eto	Staf		20
21	M. Rnali	B. Eto	Staf	21	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN	
22	HARIS YUSTIANTO	B.ADPIM	STAF TU	22	22
23	HERLINA	B.ADPIM	STAF TU	23	23
24	INDRI WAHYUMI	B.ADPIM	STAF TU	24	24
25	HUSNUL KHOTIMAH	B.ADPIM	STAF TU	25	25
26	Yasser Arif	B. Ekonomi	Plt Sub TU	26	26
27	ANDI IRHANDY	B.Apin	Staff	27	27
28	M. Saleh	B Adpim		28	28
29	Arwando D	—	Staff	29	29
30	ANALUDDIN	B AD BANG	KSR. TU	30	30
31	Burnan Alwi	—	Staff	31	31
32	Khairina Z.M.	B. Adpim	Staff	32	32
33	Eduardo H.	B. Adpim	Staff	33	33
34	M. Adhitya K.	B. Adpim		34	34
35	Wahyu Atmaja	—	Staff	35	35
36	Rona Iskhak	B. Adp	Staff	36	36
37	Haripen Shahrul	—	Staff	37	37
38	Reynaldi A.	—	Staff	38	38
39	Igo Febricansyah	B. Adpim	Staff	39	39
40	Astuti Parma	—	Kasub. tu	40	40
41				41	41
42				42	42
43				43	43
44				44	44

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. *Focus Group Discussion (FGD)* Percepatan Penyusunan RENSTRA dan Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026:



2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Setda Prov. Kaltim Tahun 2023:



3. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024:



4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023:



5. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023:



6. Evaluasi dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Setda Prov. Kaltim:



7. Forum Perangkat Daerah dan Penyusunan Ranhir RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024:



8. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023:



9. Sosialisasi dan Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Setda Prov. Kaltim



10. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023:



11. Rapat Koordinasi Diskusi Kelompok Terpumpun Penguatan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2023:



12. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023:



PIAGAM PENGHARGAAN BIRO-BIRO SETDA PROV. KALTIM
TAHUN 2023

1. BIRO ORGANISASI



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

NOMOR : 563.25/1088 /I.1/LITBANG/2023

Memberikan Penghargaan

PENJARINGAN PESERTA INOVASI DAN KREATIVITAS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PEPES IKAN PEDAS) PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Kategori Provinsi :

TERBAIK KETIGA

BIRO ORGANISASI SETDA PROV KALTIM

Dengan Inovasi

E-SAKIP PEMPROV. KALTIM

Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Saminda, 4 Desember 2023

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Memberikan :

PENGHARGAAN

Kepada :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

atas prestasinya sebagai Instansi Pemerintah dengan
Implementasi RB Tematik Terbaik pada Semua Tema Tahun 2023

Jakarta, 27 November 2023

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



ABDULLAH AZWAR ANAS

2. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



PIAGAM

Anugerah Pengadaan 2023

Diberikan Kepada

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kategori:

**PEMERINTAH PROVINSI DENGAN NILAI TRANSAKSI PDN TERBESAR
PERINGKAT 2**

Jakarta, 7 November 2023



Kepala LKPP

Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M



PIAGAM

Anugerah Pengadaan 2023

Diberikan Kepada

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kategori:

**PEMERINTAH PROVINSI DENGAN NILAI TRANSAKSI UMK TERBESAR
PERINGKAT 2**

Jakarta, 7 November 2023



Kepala LKPP

Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M

3. BIRO HUKUM





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Timur,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Samarinda, Januari 2023

Pihak Pertama
Sekretaris Daerah,

Dra. Sri Wahyuni, M.PP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3.15
	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	95.00
	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100.00
	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	90.00
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	100
	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	80
	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	80 (baik)
Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	81
	Indeks Kelembagaan	Indeks	69 (peringkat 4)
Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	77.80 (B/Baik)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77.50
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	71



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	283.681.515.445	APBD
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	7.065.124.500	APBD
3.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	15.134.838.032	APBD
4.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	68.701.219.700	APBD
5.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.423.850.000	APBD
6.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.065.189.900	APBD
7.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7.463.901.900	APBD
8.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8.016.934.400	APBD

Total Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 400.552.573.877,- (empat ratus miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Timur,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Samarinda, Januari 2023

Pihak Pertama
Sekretaris Daerah,

Dra. Sri Wahyuni, M.PP



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. M. Syirajudin, SH., M.T

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Sri Wahyuni, M.PP

Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Dra. Sri Wahyuni, M.PP

Pihak Pertama
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat,

H. M. Syirajudin, SH., M.T



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3.15
	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	95.00
	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100.00
	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	90.00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.574.650.616	APBD
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	15.134.838.032	APBD
3.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	68.701.219.700	APBD
4.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.423.850.000	APBD

Total Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **Rp 96.834.558.348,-** (sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Dra. Sri Wahyuni, M.PP

Samarinda, Januari 2023

Pihak Pertama
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat,

H. M. Syirajudin, SH., M.T



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Ujang Rachmad, M.Si

Jabatan : Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Sri Wahyuni, M.PP

Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Dra. Sri Wahyuni, M.PP

Pihak Pertama
Asisten Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan,

Ir. Ujang Rachmad, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	100
	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	80
	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	80 (baik)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.162.061.042	APBD
2.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.065.189.900	APBD
3.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7.463.901.900	APBD
4.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8.016.934.400	APBD

Total Anggaran Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **Rp 31.708.087.242,-** (tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Dra. Sri Wahyuni, M.PP

Samarinda, Januari 2023

Pihak Pertama
Asisten Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan,

Ir. Ujang Rachmad, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Riza Indra Riadi, M.Si
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Prov. Kaltim
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,



Dra. Sri Wahyuni, M.PP

Samarinda, Januari 2023

Pihak Pertama
Asisten Administrasi Umum,



Ir. Riza Indra Riadi, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	81
	Indeks Kelembagaan	Indeks	69 (peringkat 4)
Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Indeks	77.80 (B/Baik)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77.50
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	71

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	264.944.803.787	APBD
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	7.065.124.500	APBD

Total Anggaran Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **Rp 272.009.928.287,-** (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,


Dra. Sri Wahyuni, M.PP

Samarinda, Januari 2023

Pihak Pertama
Asisten Administrasi Umum,


Ir. Riza Indra Riadi, M.Si